



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

**SURAKARTA
2026**

Subur dan Berkembang



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa alias Rakhmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2023. LKJIP Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana damanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Penjabaran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu (1) tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk LKJIP Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk terpapat dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKJIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Surabaya, 13 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA



Budi Murti Nugroho, SE, M.Si
Pemimpin Utama Muka
NIP. 197410101998031010



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencapaian visi serta misi Wali Kota Surakarta. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta ketepatannya dengan pemanfaatan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk penyesuaian pada APBD Perubahan.

Kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah "Terejektivitas birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif" diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu *Maturitas Kelembagaan Pemerintah* dengan capaian kinerja 100,39%, dan *Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terlaksanakan* dengan capaian kinerja 416,2%. Selain itu terdapat 2 (dua) Sasaran peningkat daerah Sekretariat Daerah Kota Surakarta, yaitu "Mengeksploitasi dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah" dengan indikator level MRI mendapat capaian sebesar 106,33%. Sasaran yang kedua yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah" dengan indikator *Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terlaksanakan* tahun berikutnya tercapai sebesar 63,63%. Nilai LPPD tercapai sebesar 99,74%, dan Nilai SAKIP tercapai sebesar 89,00%. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar 148,38%.

Kebhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 didukung oleh perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, koordinasi dan dukungan manajerial yang efektif, kompetensi sumber daya aparatur, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Meskipun terdapat kendala berupa disain kebijakan dan penyesuaian anggaran, hal tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja.



Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, total pagu awal Sekretariat Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp72.317.444.812,00 dan disionalisasi menjadi Rp68.825.570.730,00. Realisasi sebesar Rp57.863.573.946,00 atau 88,58%, sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja sebesar 13,42%.

Dengan capaian kinerja yang melampaui target dan pemanfaatan pagu anggaran yang efisien, Sekretariat Daerah Kota Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta efektivitas dukungan manajemen pada tahun berikutnya dalam rangka mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Surabaya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.	
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR GAMBAR	vi	
BAB I		
PENDAHULUAN		1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1	
B. FUNGSI STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA	7	
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA	8	
BAB II		
PERENCANAAN KINERJA		10
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	10	
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	112	
C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	19	
BAB III		
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025		200
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	10	
B. REALISASI ANGGARAN	78	
C. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN	83	
D. REGULASI	85	
E. PENCAPAIAN LAINNYA	86	
BAB IV		
PENUTUP		89
A. KESIMPULAN	89	
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KE DEPAN	90	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah TW I-TW IV	34
Gambar 3.2	Pertandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021-2026	26
Gambar 3.3	Pandampingan kepada OPD terkait Penilaian Mandiri Evaluasi Kelembagaan dan Kematangan Organisasi	29
Gambar 3.4	Workshop terkait Sosialisasi Evaluasi Kelembagaan oleh Kementerian PANRB	29
Gambar 3.5	Target dan Rilisasi TW I – TW IV	33
Gambar 3.6	Pertandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021-2026	35
Gambar 3.7	Desk Pemetaan Potensi Kerjasama Dalam Negeri dan Money Kerja Sama Daerah	40
Gambar 3.8	Capaian kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah TW I-TW IV	42
Gambar 3.9	Sosialisasi Pelatihan SPIP	48
Gambar 3.10	Desk Pembuktian Rencana Tindak Pengendalian, Infokom, dan Monitoring	49
Gambar 3.11	Sosialisasi Penyusunan Identifikasi Risiko dan RTP TA 2025	50
Gambar 3.12	Pandampingan Penyusunan Identifikasi Risiko dan RTP TA 2025	52
Gambar 3.13	Capaian Kinerja TW I -TW IV	56
Gambar 3.14	Pertandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2021-2026	58
Gambar 3.15	Money Kerja Sama Daerah	61



Gambar 3.16	Desk Pemetaan Potensi Kerja Sama Dalam Negeri	52
Gambar 3.17	Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Rencana Tahun 2021-2025	64
Gambar 3.18	Asistensi penyusunan LPPD Tahun 2025	71
Gambar 3.19	Workshop eSAKIP Tahun 2025	76
Gambar 3.20	Desk Capaian Kinerja Tahun 2025 Triwulan I- III	78
Gambar 3.21	Penghargaan Juara 1 Lomba Penyelenggaraan Statistik Sekoral Kota Surakarta Th 2025	87
Gambar 3.22	Gambar Penghargaan Prokem (Program Kampung Ikim) Tahun 2025	87
Gambar 3.23	Penghargaan Sekda Terbaik	88
Gambar 3.24	Penghargaan Juara II Penyusunan Laporan Keuangan	88
Gambar 3.25	Penghargaan Juara 1 Indeks Tata Kelola Pegadaian	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2025	1
Tabel 1.2	Aset Sekretariat Daerah Tahun 2025	3
Tabel 1.3	Kesinambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026	7
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	10
Tabel 2.2	Indikator dan Target Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	11
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2025	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025	19
Tabel 2.5	Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025	19
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 3.2	Proses Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 3.3	Pertandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Surakarta s.d. Tahun 2025	24
Tabel 3.4	Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021-2026	25
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.6	Program/Kegiatan Responsif Gender	30
Tabel 3.7	Capaian Presentase Peningkatan Kerjasama Daerah yang Terimplementasi	33



Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Surakarta s.d Tahun 2025.....	54
Tabel 3.9 Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026.....	55
Tabel 3.10 Efisiensi penggunaan sumber daya.....	37
Tabel 3.11 Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	41
Tabel 3.12 Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Kota Surakarta s.d Tahun 2025.....	42
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Indikator Level MRI dengan Akhir Renstra.....	43
Tabel 3.14 Efisiensi penggunaan sumber daya.....	46
Tabel 3.15 Program/Kegiatan Responsif Gender.....	53
Tabel 3.16 Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah.....	55
Tabel 3.17 Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Surakarta s.d Tahun 2025.....	56
Tabel 3.18 Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2021–2026.....	57
Tabel 3.19 Efisiensi penggunaan sumber daya.....	60



Tabel 3.20	Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	82
Tabel 3.21	Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Kota Surakarta s.d. Tahun 2025.....	83
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Indikator Nilai LPPD dengan AMN Renstra.....	84
Tabel 3.23	Efisiensi penggunaan sumber daya.....	88
Tabel 3.24	Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sesuai Strategi Meringkaskan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah.....	71
Tabel 3.25	Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Surakarta s.d. Tahun 2025.....	72
Tabel 3.26	Perbandingan Capaian Indikator Nilai SAKIP dengan AMN Renstra.....	73
Tabel 3.27	Efisiensi penggunaan sumber daya.....	78
Tabel 3.28	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	78
Tabel 3.29	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	83
Tabel 3.30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	86
Tabel 3.31	Rakapitulasi regulasi yang ditetapkan tahun 2025.....	85
Tabel 4. 1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	90
Tabel 4. 2	Rencana Awal Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2027.....	92



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota Terkait Tugas dan Fungsinya.

1. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Surabaya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 292 pegawai yang tersebar di 9 (sembilan) bagian dengan rincian sebagai berikut:

Table 7.7 Rincian Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2025

KATEGORI	ASN		Non-ASN	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan



KATEGORI		ASN		Non-ASN	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
UMUR	20 Kubawab	0	0	0	0
	21 - 30 thn	16	38	26	10
	31 - 40 thn	31	35	36	6
	41 - 50 thn	31	25	37	1
	51 - 60 thn	14	10	13	1
Jumlah		94	108	116	28
Pendidikan	SD	1	0	4	0
	SMP	1	0	4	0
	SMA	0	3	34	9
	D1	0	0	0	0
	D3	13	23	2	1
	S1	54	69	12	10
	S2	16	14	0	0
	S3	0	0	0	0
Jumlah		94	108	116	28
Golongan	IV	4	10	5	9
	III	60	73	0	0
	II	21	25	0	0
	I	0	0	0	0
	Non Golongan (TIDAK)	0	0	116	20
Jumlah		94	108	116	28
Kelompok	Struktural	0	12	0	0



KATEGORI		ASN		Non-ASN	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Jabatan	Fungsional	48	48	0	0
	Pejabat	44	42	0	0
	Non-Jabatan (TRPK)	0	0	110	20
Jumlah		94	100	110	20

2. Aset Yang Dimiliki

Tabel 1. 2 Aset Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Tanah	4
2.	Peralatan dan Mesin	
	a. Alat Besar	9
	b. Alat Angkutan	44
	c. Alat Bangkai dan Alat Ukur	3
	d. Alat Pertanian	5
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1211
	f. Alat Studio, Komunikasi dan Penerimaan	20
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	4
	h. Alat Laboratorium	3
	i. Komputer	187
	j. Alat Keselamatan Kerja	8
3.	Gedung dan Bangunan	39
4.	Jalan, jaringan dan irigasi	2
5.	Aset Tetap Lainnya	140
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	1

Sumber : sinda barang

3. Struktur Organisasi



Beritasakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan kebijakan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengeoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengeoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- 1.) Sekretaris Daerah;
- 2.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan; terdiri atas:
 - Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; terdiri atas:
 - Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bagian Hukum; terdiri atas:
 - Subbagian Dekuentasi dan Informasi Hukum; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional



d. Kelompok Jabatan Fungsional

3.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

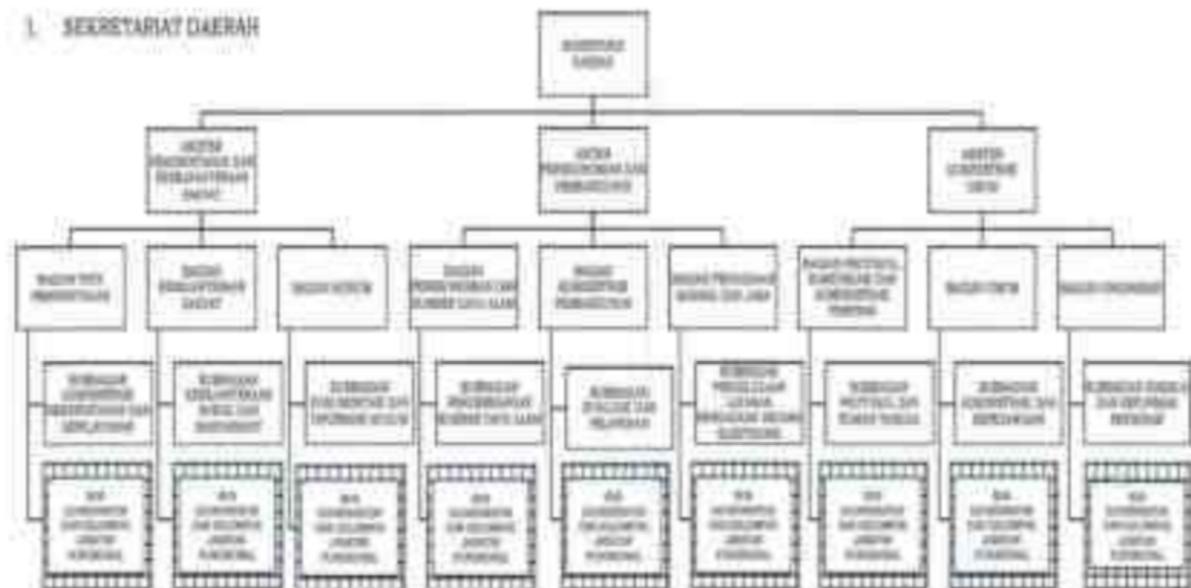
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bagian Pengadaan barang dan Jasa, terdiri atas:
 - Subbagian Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

4.) Asisten Administrasi Umum, membawahi:

- a. Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan, terdiri atas:
 - Subbagian Protokol dan Rumah Tangga, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bagian Umum, terdiri atas:
 - Subbagian Administrasi dan Perencanaan, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Kelompok Jabatan Fungsional



1. SEKRETARIAT DAERAH



Gambar 1.1 Ragan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Naha Sulawesi



E. FUNGSI STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program yang disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Surakarta ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana PD) sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Rencana Kerja yang disusun oleh setiap organisasi harus sinergi dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD. Dengan perencanaan yang jelas dan sinergis, maka visi dan misi Perangkat Daerah dapat selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 1.3. Kuantumbaruan RPJMD dan Rencana Sekretariat Daerah 2021-2026

VISI WALI KOTA SURAKARTA	
MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA	
MISI WALI KOTA SURAKARTA	
Misi 1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
Misi 2	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
Misi 3	Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung penguatan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
Misi 4	Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga
Misi 5	Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kabineka
Misi 6	Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang



bersediaan dan inklusif

Misi 7 Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SETDA

TUJUAN: Terejadinya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif.

SASARAN:

1. Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Surakarta berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, maka masih ditemukannya permasalahan pelayanan di Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya proses verifikasi dan validasi capaian kinerja dan rencana aksi reformasi birokrasi karena keterlambatan pengisian data oleh Perangkat Daerah;
2. Masih terdapat SDM yang belum optimal dalam melaksanakan tugas;
3. Adanya kebijakan refocusing anggaran yang berdampak pada penyesuaian rencana dan pelaksanaan kegiatan;
4. Jangka waktu pengajuan Permohonan POLN terlalu singkat, mendekati pelaksanaan POLN, sehingga dimungkinkan izin tidak bisa terbit sesuai permohonan atau tidak dibenarkan;
5. Masih kurangnya SDM yang memiliki kapabilitas dalam membidangi pemberdayaan masyarakat;
6. Masih kurangnya SDM yang memiliki kapabilitas dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait pembentukan produk hukum daerah;



7. Belum optimalnya fasilitas dan dukungan anggaran yang diberikan guna mendukung pencapaian Bantuan Hukum bagi Warga Miskin, dikarenakan hanya warga miskin dengan kategori P1 dan P2 yang dapat difasilitasi.
8. Kompetensi pelaku pengadaan harus selalu diperbarui
9. Kurangnya kolaborasi OPD pengampu terkait penggunaan PDN dan UMK
10. Penggunaan katalog elektronik yang belum maksimal untuk pengadaan makan minum, ATK, dan sebagainya (di luar tenaga ahli daya)
11. SDM internal yang belum bisa melakukan tuis sebagai Pokja Pemilihan;
12. Belum optimalnya proses penyusunan perencanaan fisik dan keuangan OPD dan pelaporan OPD mengenai progress capaian realisasi kegiatan sering mengalami keterlambatan;
13. Kurang sinkronnya antara program pelaksanaan TJSP dengan program skala prioritas pembangunan dan belum optimalnya koordinasi program TPID;
14. Kebutuhan rumah tangga KDH dan WKDH yang belum terpenuhi.
15. Adanya beberapa agenda tambahan KDH dan WKDH yang belum direncanakan sebelumnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah berdasarkan Perwali Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sukoharjo dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah mendukung misi 5. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih Dan Kolaboratif Berbasis Sistem Semangat Golong Royong Dan Kebhinekaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan	$EOP = \frac{KOP}{JPO} \times 100\%$ <p>KOP = Jumlah Organisasi Daerah JPO = Total Rinc. Perangkat Daerah JPI = Jumlah Perangkat Daerah</p>
	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang implementasi	Persentase kerjasama daerah yang terimplementasi pada tahun n berjalan - persentase kerjasama daerah yang terimplementasi pada tahun (n-1)

2. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 2.2 Indikator dan Target Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Luas MRI	Perhitungan Nilai MRI mengacu pada Peraturan BPPF No 5 Tahun 2021 Tentang Perkiraan Matriks Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang selengkapselengkap tahun berikutnya	Jumlah nilai kerjasama daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dibagi jumlah nilai kerjasama daerah yang ditandatangani x 100%
		Nilai LPPD	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun N-2
		Nilai SARP	Nilai Erwujud SAKUP Kota Sukahara



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKT ini disusun sebagai perjabaran tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang selaras dengan RPJMD.

Fokus kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 diarahkan pada peningkatan efektivitas koordinasi, perumusan kebijakan, serta pelayanan administrasi pemerintahan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan berukur guna mendukung pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan RKT Tahun 2025 dipantau dan dievaluasi secara berkala sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan pertakuran kinerja berkelanjutan.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TRAGET	
Terwujudnya kinerja yang responsif, adaptif, proaktif, dan kolaboratif	MataKor Kelembagaan Pemerintah Kota	Nila	50,74	
	Persentase peningkatan serjanta daerah yang terpromosikan	%	10	
Mengaknisi risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai sasan Pemerintah Daerah	Level MRI	Level	5	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Level MRI	level	3,00	
Pelaksanaan Perekonomian	Kegiatan	Persentase Tempatnya Loba BUND	%	60
		Persentase Tempatnya Raku ZPD	%	65
		Persentase Tempatnya Fasilitas T.IMPACT	%	90
Koordinasi, Sinergisitas, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUND dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinergisitas, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUND dan BLUD	Dokumen	10	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TRAGET
Perencanaan dan Pelaksanaan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian nilai PM.MRI level 500	Nilai	2,75
Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	26
Pengalaman Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4
Pengadaan Pergadaan Barang dan Jasa	Persentase ketercapaian nilai tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Prosa BPTJ	%	100
Pengadaan Pergadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pergadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4
Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	1
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	020
Pemertanian Kelengkapan Sumber Daya Awan	Persentase Terpenuhiya Penyempalan informasi tingkat LPG	%	100
Kontinuitas, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perantara, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Perantara, Perangi, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, HUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	2
Kontinuitas, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	2
Meningkatnya Akurabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai LPRO	Nilai	3,8
	Nilai SIQOP	Nilai	30

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TRAGET
Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang mengimplementasi bahan berikutnya	%	88
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPRO	Nilai	3.8
	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang mengimplementasi standar berikutnya	%	88
Administrasi Tata Pemerintahan	Rata-rata capaian kinerja SPM	%	100
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	30
Facilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	0
Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Rakyat	persentase omnes dan lembaga keagamaan yang aktif dalam kerjasama lintas sektor	%	80
Facilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	27
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Rencana, Rencana, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Layanan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pertanahan Sip4, Pembantuan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	10
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Layanan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kebudayaan, Penguatan, Kesehatan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dokumen	2
Facilitas dan Koordinasi Hukum	Prosedure legislasi bidang hukum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah	%	88
Facilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	500
Facilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus	15

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TRAGET
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	600
Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase hasil kerja sama daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	%	100
Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	45
Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	15
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOTA			
Pertanian Organik	Persentase Maturitas PD tingkat level 1	%	100
Pertanian Organik	Nilai BKW Pemerintah Kota Sumbawa	nilai	80
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Dokumen	4
Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3
Fasilitasi Kewaja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kewaja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3
Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	5
Kontribusi dan Penguasaan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kontribusi dan Penguasaan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	8
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penerapan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2
Penyediaan Pakelan Dinas dan Asesor Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Asesor Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dibedakan	Paket	2
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TRAGET
Pelaksanaan Program dan Komunikasi Pimpinan	penyusunan perencanaan kegiatan pimpinan di bidang keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	%	100
Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	720
Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	720
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	720
Fasilitas Karumahaenggaan Sakralitas Daerah	Persentase pemenuhan syarat-syarat daerah	%	100
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	12
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	12
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Paket	12
Perencanaan, Penganggaran, dan Eksekusi Kinerja Perangkat Daerah	Rasio SAKIP OPD Rasio SIPIP OPD	nilai nilai	75 3
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terkumpulnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Merorome Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	199
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Satuan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Satuan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TRAGET
Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	%	100
	Nilai SKM OPD	nilai	85,25
	Nilai Mutuas Kelembagaaan	skor	45
Pengadaan Peluasan Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Paket Peluasan Dinas beserta Atribut Kelembagaan	Paket	1
Perbaikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Perbaikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	Dokumen	1
Pemeliharaan Satang Milik Daerah Peningkatan Usahan Pemertahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Peningkatan Usahan Pemertahan Daerah yang dipelihara	%	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemertahan Dinas atau Kelembagaan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemertahan Dinas atau Kelembagaan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	110
Pemeliharaan Motor	Jumlah Motor yang dipelihara	Unit	118
Pemeliharaan Asat Tak Berwujud	Jumlah Asat Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	8
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sempa dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sempa dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	73
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian sarana prasarana untuk administrasi umum kantor	%	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1
Penyediaan Perabot dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabot dan Peralengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TRAGET
Penyediaan Bahan Baku dan Perbaikan Penunjang-dukungan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Rencanabid SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Rencanabid SKPD	Laporan	4
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	%	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10
Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya semua dan sebagian penunjang usaha pemerintah daerah	%	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4
Penyediaan Jasa Pelayanan Usaha Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Usaha Kantor yang Disediakan	Laporan	4

Sumber: Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2025



C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dengan target yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2025 yang kemudian diubah dalam PK Perubahan Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 disusun karena terjadi perubahan target yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan 2025. Perubahan target dilakukan karena target telah tercapai pada tahun sebelumnya. Berikut PK Perubahan Sekretaris Daerah Tahun 2025:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Setelah
1.	Terwujudnya jaringan yang nasional, adaptif, gesit, dan kolaboratif	Mutuasi Kelembagaan Pemerintahan Kota	90,03 nilai	90,74
		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Daerah yang Terlaksanakan	10%	10
2.	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level NPD	3 (level)	3 (10)
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan daerah yang terlaksanakan tahun berikutnya	88%	98
		Nilai LPPD	3,8 nilai	3,5
		Nilai SAKIP	90 nilai	90

Tabel 2.5 Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.251.155.317,00	1.323.242.143,00	APBD-P
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.496.679.898,00	9.804.157.188,00	APBD-P
3.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.570.000.397,00	55.702.882.798,00	APBD-P



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk membertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Revisi 2025			
			Setoran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Tercapainya sambutan yang responsif, efektif, dan tanpa kontak fisik	Membias Keterbacaan Pemerintah Kota	Nilai	80,74	80,34	100,39
		Peningkatan Peningkatan Kapasitas Daerah yang Terintegrasi	%	10	41,62	416,2
2.	Mengikuti suku dan gotong royong sambutan Pemerintah Daerah dalam menyapa ujian Pemerintah Daerah	Level MPT	Level	1	1,70	106,33
3.	Meningkatkan Aksesibilitas Kerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Peningkatan peningkatan kemampuan daerah yang terintegrasi tahun berikutnya	%	98	91,75	93,63
		Nilai LPPD	Nilai	3,8	3,79	99,74
		Nilai SAKIP	Nilai	90	72	80,00
Rata-Rata Capaian						149,39

Setiap capaian kinerja akan predikat dengan menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut:

Prekualifikasi	Nilai	Moran
Sangat Baik	$a > 80$	100,0
Baik	$70 < a < 80$	77,5
Cukup Baik	$60 < a < 70$	62,5
Tidak Baik	$a < 60$	27,5

n = capaian

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a) Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Evaluasi dan analisis capaian masing-masing kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif

A. Indikator Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota

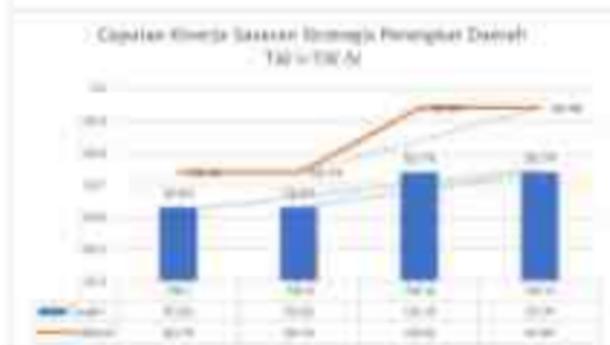
a. Progres capaian Kinerja Tahun 2025

Progres capaian antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 secara tahunan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Sat. ukur	TARGET				TRW I		TRW II		TRW III		TRW IV	
		Q1/25	TRW I	TRW II	TRW III	Realisasi	Capaian	Predefinit	Realisasi	Capaian	Predefinit	Realisasi	Capaian
Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	Nilai	50.74	52.83	54.83	56.74	56.74	100.22	Sangat Baik	56.74	100.22	Sangat Baik	56.74	100.22

Proses capaian Nilai Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota Sorakarta tahun 2025 selama Triwulan I s.d. Triwulan II dihitung menggunakan Nilai Maturitas Kelembagaan Tahun 2024 dimana target disesuaikan dengan RKPD Mumi Tahun 2025 yaitu sebesar 50.83. Nilai maturitas kelembagaan tahun 2025 nilai pada triwulan III sebesar 50.94 dengan target yang telah disesuaikan menjadi 50.74 maka capaian indikator maturitas kelembagaan pemerintah kota terhadap target tahun 2025 sebesar 100.39% dengan predikat Sangat Baik.



Dambar 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (TAU-TW IV)

Nilai maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025 menunjukkan nilai 50,94 dengan kategori sangat tinggi. Nilai tersebut meningkat 0,2 poin dari tahun 2024 sebesar 50,74. Hasil penilaian tersebut telah melalui proses validasi dan verifikasi dari Bim Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 Agustus 2025.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi indikator kinerja Maturitas kelembagaan Pemerintah Kota Semarang apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tren selalu meningkat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kelembagaan Daerah Kota Semarang 1.1 Tahun 2025

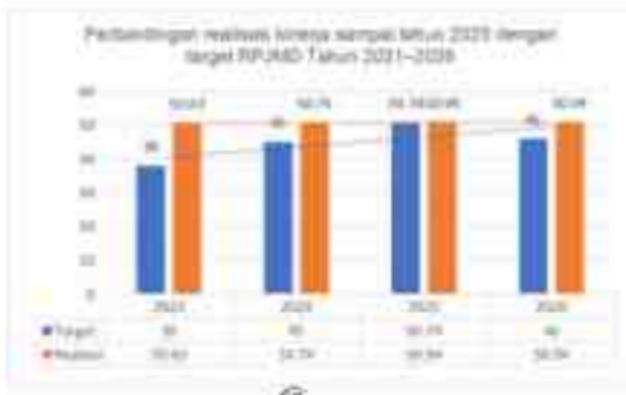
Indikator	Subsah	2024		2023		2024		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	N/A	50,00	50,94	50,00	50,00	50,00	50,74	50,74	50,94

Dari tahun 2022 hingga 2025 target nilai matras lembaga pemerintah kota dapat diraih bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Tren realisasi selalu meningkat setiap tahunnya. Realisasi nilai matras lembaga pemerintah kota pada tahun 2025 meningkat 0,2 dari tahun 2024. Peningkatan realisasi juga terjadi pada tahun tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target RPJMD Tahun 2021–2026

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2025 Luar RPJMD			
		Target	Nilai Realisasi	Capaian (%)	Target	Nilai Realisasi	Capaian (%)	Target	Nilai Realisasi	Capaian (%)				
Kualitas Kelembagaan & Pemerintahan Kota	Nilai	88,06	90,83	103,24	45	60,74	135,26	Sangat Baik	60,74	60,94	100,36	Sangat Baik	45	110,73



Gambar 3.2. Perbandingan realisasi Kinerja sampai tahun 2023 dengan target RPJMD Tahun 2021-2026

Dibandingkan dengan target akhir tahun perencanaan berdasarkan Dokumen RPJMD 2021-2026 yakni sebesar 46, realisasi Maturlitas Kelambagaan Pemerintah Kota sudah melebihi target yaitu 50,94 dengan capaian 110,73% (Sangat berhasil).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian target Maturlitas Kelambagaan Pemerintah Kota tidak terlepas karena dilakukannya beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya Workshop terkait Sosialisasi Evaluasi Kelambagaan oleh Kementerian PANRB.
2. Tim Verifikator QFD melakukan pendampingan secara intensif kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pengumpulan dan pemenuhan data dukung terhadap 11 variabel sesuai dengan tingkat penilaian. Sehingga kendala dalam melakukan penilaian mandiri dan pengumpulan data dukung melalui aplikasi dapat diresalkan dan dilaporkan tepat waktu.
3. Melakukan perbaikan aplikasi Bangs Sembak untuk mempermudah perangkat daerah dalam melakukan penilaian mandiri dan dilakukannya verifikasi oleh Tim Verifikator.
4. Meningkatkan pemahaman Pimpinan Organisasi akan pentingnya penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang ditunjukkan dengan pembuktian yang relevan dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan maturlitas kelambagaan.

Namun demikian masih terdapat hambatan dalam pencapaian target, yaitu:



1. Masih terdapat nilai rendah pada variabel 5 yaitu Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dimana untuk mencapai nilai maksimal semua alat yang telah direncanakan harus seluruhnya dilaksanakan, dan perlu adanya movev diklat serta tindak lanjut penguatng diklat. Hal ini menjadi kendala karena berkaitan dengan anggaran pelaksanaan diklat.
2. Kurangnya penerusan data dukung pada variabel 6 yaitu Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat seperti SK Tim Internal, SK Tim AN/Narasumber, konsultasi publik atau analisis feedback berupa kegiatan FGD dan sosialisasi yang melibatkan Masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam mencapai nilai maksimal pada variabel tersebut.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target yaitu dengan menyusun monitoring dan evaluasi diklat (capaian diklat, kendala, tindak lanjut) dan rencana kebutuhan diklat disusun berdasarkan jumlah jabatan (struktural, pelaksana, fungsional) tidak berdasarkan jumlah pegawai untuk mengakomodir jumlah diklat yang direncanakan sama dengan jumlah yang tersedia.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, method*).

Datani mendukung pencapaian kinerja Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota, metode penilaian dilakukan melalui Senja Simbak sehingga dari segi waktu dan SDM dapat lebih optimal dan efisien. Selain itu, upaya efisiensi telah dilakukan dengan melakukan re-focusing atas program kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5. - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program Subang	Awal	Desain Terkait	Anggaran Berkas (Rp)	Anggaran Pembelian (Rp)	Shredding (Rp)	ASAP Tersedia dengan MS Seri
Perencanaan			1.307.928.302	1.024.021.114	273.907.188	

Program Kegiatan	Alokasi	Dibayar (Miliar)	Anggaran Monev (Miliar)	Anggaran Pelaksanaan (Miliar)	Realisasi (%)	Analisis Efektivitas Anggaran Monev (%)
Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan Lainnya			163.878.200	368.428.000	117,381138	
	Forum Kelembagaan	656	183.088.700	96.028.700	110,001138	55% dari anggaran yang diperuntukkan untuk pembelian PU/Insentif Kelembagaan 55% dari anggaran yang diperuntukkan untuk pembelian PU/Insentif Kelembagaan
	Pelaksanaan Database Fisik Angk. RTM dan Sistemasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	insentif	122.448.800	116.448.800	100,001138	
	Pelaksanaan Rencana Tindakan Pengawasan Adm	insentif	42.840.500	42.840.500	9	
	Pelaksanaan Disiplin Organisasi Perangkat Daerah	insentif	140.922.700	140.002.700	4	

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Dalam mendukung pencapaian kinerja Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota, dibakukan melalui Program Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penataan Organisasi Subkegiatan Pengadaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan dengan total anggaran Rp368.428.000,00 dan terlaksana sebesar Rp355.752.650,00 atau sebesar 91,13%. Beberapa kegiatan melalui program penunjang urusan pemerintah pada kegiatan penataan organisasi meliputi:

Gambar 3.3. Peningkatan Featrade CPO terkait Pelatihan Mandiri Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Organisasi



Gambar 3.4. Workshop terkait Sosialisasi Evaluasi Kinerja dengan formatasi PAKS

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Perangkat berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam program dan kegiatan. Pemecanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Sekretariat Daerah diimplementasikan pada Program Perancang Lulusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Upaya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui kegiatan Pemataan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp420.579.702,00.



Tabel 1.6 Program/Kegiatan Responsif Gender

No	Aktivitas	Output	Sasaran	Anggaran Fondasi (Rp)	Isu Gender			Tipe aktivitas Responsif Gender
					Dasar Gender	Faktor Penyebab Langsung	Faktor Penyebab Tidak Langsung	
1	1. Meny EKM tiap tahun 2. Meny dan SOP 3. Pelaksana REKPP	Jurnal Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan TataLaksana	Dokumen	420.579.702	- Jumlah UPP yang ditilai dalam REKPP tahun 2023 sebanyak 36 OPD dan RSUD (RSUD di Kabupaten Soekarno) - UPP berprodukt Pelayanan Prima = 10 UPP (42%) - UPP berprodukt Sangat Baik = 16 OPD (33%) - UPP berprodukt Baik = 7 OPD (19%) - Selain melaksanakan sarana pelayanan prima kelompok kerja di Pelayanan Dasar. - Jumlah UPP yang melaksanakan SKM pada tahun 2022 sebanyak 15	Keterbatasan sumber daya untuk mengur pemerintah sangat ter LEP	1. Keterbatasan sumber daya untuk menyediakan sarana pelayanan prima dalam kelompok kerja di UPP 2. Belum semua Pelayanan Dasar sangat baik pendukung pemerintah sangat prima dalam kelompok kerja	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata laksana serta mengevaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya



No	Aktivitas	Output	Satuan	Anggaran Perubahan (Rp)	Isu Gender			Tujuan aktivitas Respon Gender
					Dasar Gender	Faktor Penyebab Langsung	Faktor Penyebab Tidak Langsung	
					<p>UPP pada TW 1-11, dan 152 UPP pada 7WV</p> <p>Pada tahun 2023 mendapat 157 UPP yang melaksanakan SKA pada TW 1-11 dan 150 UPP pada TW 11-14 Jumlah UPP yang mendapat nilai Sarpras sebagai 3 unsur terendah:</p> <p>2022 TW 1= 13 UPP TW 2= 16 UPP TW 3= 24 UPP TW 4= 24 UPP Rata-rata tahun 2022 mendapat 14% UPP.</p> <p>2023 TW 1= 30 UPP TW 2= 27 UPP TW 3= 18 UPP TW 4= 25 UPP Rata-rata tahun</p>			



No	Aktivitas	Output	Satuan	Anggaran Perubahan (Rp)	Isu Gender			Tujuan aktivitas Respon Gender
					Data Gender	Faktor Penyebab Langsung	Faktor Penyebab Tidak Langsung	
					2022 terdapat 10% UPP + Jumlah responden SKM 2022 = 64.588 orang Laki-laki = 27.625 (43%) Perempuan = 36.960 (57%) 2023 = 78.898 Laki-laki = 31.724 (40%)			

32

B. Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah yang Terimplementasi

a. Progres capaian Kinerja Tahun 2023

Pada sasaran strategi terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif, indikator Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tercapai dengan capaian tahun 2023 sebesar 418,62% dengan capaian per triwulan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Capaian Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah yang Terimplementasi

Indikator	Satuan	TARGET				TW I	TW II	TW III	TW IV
		2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi Capaian %	Realisasi Capaian %	Realisasi Capaian %
Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	Persentase	50	50	50	50	2,29 110 Sangat Baik	4,32 308,25 Sangat Baik	8,12 539,82 Sangat Baik	41,86 418,62 Sangat Baik



Gambar 2.8 Target dan Realisasi TW I - TW IV



Nilai Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya ditargetkan 10% pada tahun 2025 dan progresif setiap triwulan. Capaian Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi pada setiap triwulan selalu melampaui target triwulanan yang telah ditetapkan dan pada akhir tahun realisasi sebesar 41,62% dan target 10% dengan capaian 416,2% kategori sangat berhasil.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dibandingkan dengan target dan realisasi dengan beberapa tahun terakhir, kinerja indikator Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya selalu melampaui target tahunan yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Sukoharjo s.d. Tahun 2025

Indikator	Satuan	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	Persen	8	12,55	8	34,02	8	33,61	10	41,62

Dari tahun 2022 hingga 2025 realisasi indikator Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi dapat diarah bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dengan peningkatan yang signifikan mulai 12,55% pada tahun 2022 hingga 41,62% pada tahun 2025.



Dibandingkan dengan target pada akhir tahun perencanaan yaitu 10%, kinerja Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tercapai sebesar 41,62% dengan predikat sangat berhasil.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang menjadi pendorong pencapaian kinerja antara lain, seperti:

1. Perencanaan kerja sama yang disusun secara rasional dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Komitmen dan koordinasi yang kuat antarperangkat daerah serta mitra kerja sama.
3. Ketersediaan regulasi dan pedoman teknis yang jelas sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.
4. Dukungan anggaran dan perugasan sumber daya manusia yang memadai.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala untuk memastikan tindak lanjut berjalan sesuai rencana.

Adapun yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja

1. Perbedaan prioritas dan kepentingan antar daerah atau mitra kerja sama. Sebagian kerja sama masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya diindaklanjuti dengan kegiatan konkret, sehingga kontribusinya terhadap capaian kinerja masih terbatas.
2. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk merindaklanjuti kerja sama menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan kerja sama.
3. Proses birokrasi dan administrasi yang panjang sehingga mempengaruhi implementasi.
4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah pelaksana yang berdampak pada lambatnya pelaksanaan dan rendahnya integrasi kerja sama dengan program pembangunan.



5. Perubahan kebijakan atau regulasi yang mempengaruhi keberlanjutan kerja sama

Dalam upaya pencapaian target Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya Pemerintah Kota Surakarta, Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran maupun metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, method*).

Dalam mendukung pencapaian kinerja, upaya efisiensi telah dilakukan dengan melakukan re-focusing atas program kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 3.10 Efisiensi penggunaan sumber daya

Prog/Reg/ Subreg	Aktivitas	Output (jumlah)	Anggaran Mula (Rp)	Anggaran Perbaikan (Rp)	Effisiensi (%)	Analisa Kelembatan dengan BKU OPD
Fasilitas Kecamatan Daerah						
Fasilitas Kerja Sama Daerah Negeri						
	Desin Pemetaan Potensi Rencana Kerja Sama Daerah Negeri		3.380.000	8.370.000	1.010.000	
	Fasilitas Asa Bahan Penyusunan Kerja Sama Kekeluargaan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Keanggotaan Persepsi, Aspek Rumus 61, Dan Aspek		19.904.000	19.904.000	0	
	Konultasi Dan Rapat Koordinasi Luar Daerah Dalam Rangka Fasilitas Kerja Sama Daerah Dalam Penyelenggaraan Program Publik		75.030.000	75.000.000	0	
	Perwujudan Ruang Publik Terpadu		144.585.840	108.321.881	38.263.959	
			13.471.000	15.470.000	0	



Program/ Subsektor	Aktivitas	Output (kualitas)	Anggaran Mula (Rp)	Anggaran Penutupan (Rp)	Efisiensi (%)	Aspek Keterkaitan dengan RPJW OPD
	Penyempurnaan Workshop Pemetaan Potensi Rencana Kerja Sama Dalam Negeri		16.055.000	16.005.000	0	
	Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Dalam Negeri		123.120.000	123.120.000	0	
Realisasi Kerja Sama Luar Negeri						
	Realisasi Rapat Koordinasi Hubungan Luar Negeri		9.800.000	9.800.000	0	
	Jamuan Perantaraan Tamu Di Restoran		8.100.000	8.100.000	0	
	Rekrutement Perantara Kota Sukakarta Dalam Ujung Atap Dan Ombuds		102.020.000	102.020.000	0	
	Pengadaan Suvenir Dan Souvenir		10.710.000	0	10.710.000	
	Pengadaan Orasi Pengurusan Hubungan Internasional		117.000.000	30.000.000	67.000.000	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						
	Desk Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah		3.100.000	3.100.000	0	
	Rapat Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Kerja Sama Daerah		3.600.000	3.600.000	0	

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

Dalam mendukung pengabdian kerja Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi dilakukan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri dengan total anggaran Rp493.690.681,00 dan terrealisasi sebesar Rp493.257.390,00 atau sebesar 89,91%. Keberhasilan pencapaian kinerja kerja sama Kota Sukakarta Tahun 2025 didukung oleh beberapa program dan kegiatan utama, antara lain:



a. Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri.

Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri Kota Surakarta Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan strategis yang mendukung pencapaian pernyataan kinerja kerja sama daerah:

- 1) Workshop Pemetaan Kerja Sama dan Desk Pemetaan Kerja Sama berperan dalam mengidentifikasi potensi, kebutuhan, serta peluang kerja sama antar daerah dan dengan pihak terkait. Kegiatan ini meningkatkan kualitas perencanaan kerja sama agar lebih terarah, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta berbasis kebutuhan perangkat daerah.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pleno Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan Rapat Koordinasi Kerja Sama Dalam Negeri mendukung penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Kegiatan ini memastikan keterpeduan peran, mempercepat proses persetujuan kerja sama, serta meminimalkan tumpang tindih pelaksanaan kerja sama.
- 3) Kelukubertan Kota Surakarta dalam keanggotaan FORSESDASI, APEKSI Komisanat Wilayah III, dan APEKSI memberikan kontribusi signifikan terhadap perluasan jejaring kerja sama. Forum tersebut menjadi sarana berbagi praktik baik (*best practices*) peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peninjauan kerja sama strategis antar pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2025 telah mendukung peningkatan kualitas tata kelola kerja sama Kota Surakarta. Namun demikian, optimalisasi tindak lanjut hasil forum dan pemetaan kerja sama masih perlu ditingkatkan agar manfaat kerja sama dapat dirasakan secara lebih nyata dan berkelanjutan.

b. Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri.



Kontinuitas Hubungan Luar Negeri mendukung pencapaian kinerja melalui penyelarasan kebijakan serta perencanaan kerja sama luar negeri yang lebih terarah. Keikutsertaan dalam UCLG ASPAC dan CWHC-AF memberikan manfaat berupa pertukaran praktik terbaik, peningkatan citra Daerah, dan peluang kerja sama internasional. Selain itu, perjanjian dinas luar negeri mendukung percepatan komunikasi dan tindak lanjut kerja sama dengan mitra luar negeri. Serta Perjanjian Dinas Luar Negeri (PDLN) adalah prosedur administrasi formal yang wajib dipenuhi oleh pejabat negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pegawai lembaga negara lainnya sebelum melakukan perjanjian ke luar negeri dalam rangka tugas kedinasan. Izn ini berfungsi sebagai instrumen legalitas, pengakuan, dan akuntabilitas.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kerja sama Daerah menjadi salah satu penunjang utama kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Melalui monev, pelaksanaan kerja sama dapat dikendalikan, dievaluasi tingkat efektivitas dan manfaatnya, serta diselaraskan dengan tujuan pembangunan Daerah. Hasil monev menjadi dasar perbaikan ketajaman, penguatan koordinasi lintas Perangkat Daerah, dan penentuan keberlanjutan kerja sama, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kota Surakarta.

Gambar 3.7 Desk Pemekab Piteral Kojinana Dalam Negeri dan Monev Kerja Sama Daerah





Konferensi dengan Peserta X'at Inohat /CDLV ke X'at



Pengawasan japor dan esk jember di Kementerian Lora Negeri

2. Sasaran Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah

A. Indikator Level MRI

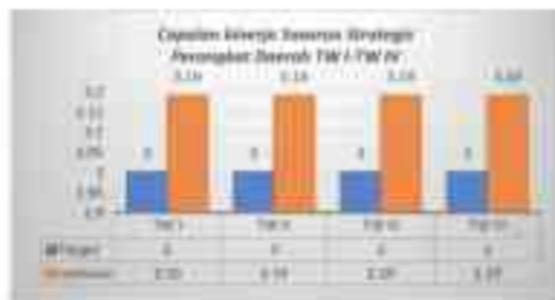
a. Progres Capaian 2025

Progres capaian antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 secara triwulanan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11 Progres Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator	Satuan	TARGET				TW I	TW II	TW III	TW IV								
		2025	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	Capaian	Presentase Realisasi	Capaian	Presentase Realisasi	Capaian	Presentase Realisasi				
Level MRI	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Progres capaian Nilai MRI tahun 2025-Triwulan I s.d. Triwulan IV dituntut menggunakan Nilai MRI Tahun 2024 karena sampai saat ini hasil penilaian belum keluar dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dengan target nilai 3 pada tahun 2025, dan realisasi 3,19 maka tercapai sebesar 106,33% dengan kategori sangat berhasil.



Gambar 3.6 Capaian kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah TW I-TW IV

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi indikator kinerja Level MRI apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tren selalu meningkat. Hal ini, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.12 Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah KMD Surakarta s.d. Tahun 2025

Indikator	Satuan	2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi



Level MRI	Level	2,3	3	2,70	3,016	3	3,19	3	3,19
-----------	-------	-----	---	------	-------	---	------	---	------

Dari tahun 2022 hingga 2025 realisasi nilai MRI sudah melampaui target. Tahun 2025 target nilai MRI sebesar 3 dengan realisasi masih memikai data tahun 2024 sebesar 3,19.

Peningkatan ini mencerminkan bahwa pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta telah berkembang dan sesuai pemenuhan administratif menuju sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan tertanam dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan risiko yakni terlaksananya mekanisme pengendalian dan evaluasi pengelolaan risiko dan membangun Budaya Sadar Risiko pada Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2021–2025

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian indikator Level MRI dengan Akhir Renstra

Indikator	Setoran	2023			2024			2025			Tahun 2025 (Akhir Renstra)	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Level MRI	Level	2,70	3,016	112,95	3	3,19	106,33	3	3,19	106,33	3	106,33

Indikator Level Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 3,00, sementara realisasi mencapai 3,19, atau 106,33%, dengan predikat Sangat Berhasil. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target tahunan, namun juga melampaui target akhir RPJMD Tahun 2025 yang ditetapkan pada level 3.



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan pencapaian Level MRI Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- a. **Meningkatnya Kesadaran dan Budaya Risiko**
Perangkat Daerah semakin memahami pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bukan sekadar kewajiban peraturan.
- b. **Penguatan Peran Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko**
Bagian Administrasi Pembangunan berperan aktif sebagai koordinator, fasilitator, dan pendamping Perangkat Daerah dalam penyusunan identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian.
- c. **Dukungan Manajemen Puncak**
Keterlibatan pejabat struktural dan pimpinan Perangkat Daerah dalam kegiatan sosialisasi dan desk pembuktian memperkuat komitmen organisasi terhadap pengelolaan risiko.
- d. **Peningkatan Kualitas Data dan Dokumen Pendukung**
Penyusunan identifikasi risiko, RTP, informasi dan komunikasi, serta monitoring dan evaluasi semakin sistematis dan terdokumentasi dengan baik.
- e. **Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Risiko**
Penggunaan aplikasi/sistem informasi mempermudah proses pengumpulan, pemantauan, dan evaluasi manajemen risiko secara berkelanjutan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Sebagai upaya menjaga keberlanjutan peningkatan kinerja, alternatif solusi yang telah dan terus dilakukan antara lain:

- a. Sosialisasi berkelanjutan terkait SOP dan Manajemen Risiko supaya membudaya pada setiap lini organisasi di Pemerintah Kota Surabaya.



- b. Pendampingan intensif kepada Perangkat Daerah dengan pendekatan coaching dan desk review dalam pengelolaan manajemen risiko;
- c. Pembagian PIC pendampingan untuk menjamin efektivitas dan kualitas asistensi pengelolaan risiko;
- d. Penguatan monitoring dan evaluasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) demi memastikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tersebut diinformasi dan dikomunikasikan serta dimonitor pelaksanaannya.

e. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method).

Dihat dari Sumber Daya Manusia (Man), pemanfaatan sumber daya manusia dinilai efisien dan efektif. Tim Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko memiliki kompetensi yang memadai dan menjalankan fungsi koordinasi, sosialisasi, serta pendampingan secara optimal. Keterlibatan lintas perangkat daerah juga meningkatkan efektivitas tanpa memerlukan penambahan personel baru.

Sedangkan dari sumber daya keuangan, kegiatan manajemen risiko difaktakan dengan prinsip **efisiensi anggaran**, antara lain melalui:

- a. Pemanfaatan platform daring (*Zoom/WhatsApp*) untuk sosialisasi dan pendampingan;
- b. Integrasi kegiatan manajemen risiko dengan agenda SPIP dan pengendalian internal lainnya;
- c. Fokus anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan Level MRI.

Dari sisi metode (method) dinilai tepat dan adaptif, meliputi:



- Sosialisasi lemah dan teknis berbasis kebutuhan Perangkat Daerah;
- Pendampingan langsung (desk pembukuan dan asistensi RTP);
- Penggunaan sistem informasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi data;
- Monitoring dan evaluasi berbasis atas pelaksanaan pengendalian risiko.

Dalam mendukung pencapaian kinerja, upaya efisiensi telah dilakukan dengan melakukan re-focussing atas program kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 3.14 Efisiensi penggunaan sumber daya

Program/ Subkeg	Aktivitas	Output (jumlah)	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perhitungan (Rp)	Efisiensi (%)	Analisa Ketepatan Anggaran INK GRD
Administrasi Pembangunan			552.447.268	518.247.268	100.450.268	
Proses Penyusunan Program Pembangunan			31.155.000	22.450.000	-10.705.000	
	Peraturan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Sorong	Dokumen	31.155.000	22.450.000	-10.705.000	
Persiapan dan Evaluasi Program Pembangunan			204.042.268	388.272.268	190.230.000	
	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur	Laporan	54.850.000	54.850.000	0	
	Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Pengendalian Atas Risiko	Laporan	84.825.000	12.825.000	-2.000.000	



Indikator Kinerja	Aktivitas	Subjek (kegiatan)	Anggaran Mula 2021	Anggaran Perubahan 2021	Saldo 2021	Analisis Ketepatan Waktu Dengan BDU DPP
	Monev dan Pengendalian Capaian Realisasi Program Pembangunan Daerah SKPD di Pemerintah Kota Sukoharjo	Laporan	64.367.200	61.097.200	-2.770.000	
	Pengendalian Pencapaian Pembangunan Daerah	Laporan	0	200.000.000	200.000.000	
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			115.250.000	97.175.000	-18.075.000	
	Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	Laporan	65.600.000	56.700.000	-8.900.000	
	Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021	Laporan	5.250.000	7.325.000	1.875.000	
	Penyusunan RIF dan Evaluasi Manajemen Risiko	Laporan	10.850.000	10.850.000	0	
	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bawahi Prowil	Laporan	26.550.000	17.300.000	-11.050.000	

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

Dalam mendukung pencapaian kinerja level MRI, dilakukan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan pada kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan total anggaran 518,897,268,00 dan terlaksana sebesar Rp277.734.750,00 atau sebesar 53,53%. Kinerja Level MRI Kota Surakarta Tahun 2025 didukung oleh beberapa pelaksanaan program dan kegiatan utama, antara lain:

1. Sosialisasi Penilaian Mandiri SPIP

Kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap PM SPIP sebagai dasar penilaian Manajemen Risiko Indeks oleh BPKP.

Gambar 1.9 Sosialisasi Penilaian SPIP





2. Desk Pembukuan Rencana Tindak Pengendalian, InKcom, dan Monitoring

Desk pembukuan memastikan bahwa komitmen pengelolaan risiko tidak hanya tertuang dalam dokumen, tetapi juga dilaksanakan secara nyata.

Gambar 3.10 Desk Pembukuan Rencana Tindak Pengendalian, InKcom, dan Monitoring





3. Sosialisasi Penyusunan Identifikasi Risiko dan RTP TA 2025
Kegiatan ini mendorong terbentuknya budaya sadar risiko dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen manajemen risiko di Perangkat Daerah.

Gambar 3.17 Sosialisasi Penyusunan Identifikasi Risiko dan RTP TA 2025





4. Pendampingan Penyusunan Identifikasi Risiko dan RTP TA 2025

Pendampingan berkontribusi langsung terhadap mutu dokumen risiko, kejelasan mitigasi, serta kesesuaian dengan tujuan organisasi.

Gambar 3.12 Penyalangan Peryusutan Mendukung Risiko diet NTP Di 2008



Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Paragda berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam program dan kegiatan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Sekretariat Daerah diimplementasikan pada Program Perekonomian dan Pembangunan. Upaya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui Pelaksanaan Administrasi Pembangunan pada dengan anggaran sebesar Rp115.250.000,00.

Tabel 3.13 Program/Kegiatan Responsif Gender

No	Aktivitas	Output	Sasaran	Anggaran Perubahan (Rp)	Isu Gender			Tujuan aktivitas Responsif Gender
					Data Gender	Faktor Penyebab Langsung	Faktor Penyebab Tidak Langsung	
1	Pengelolaan Manajemen Risiko	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi	Laporan	115.231.000	<ul style="list-style-type: none"> - Komposisi Tim Pengelola Risiko dan Tim Uji Kegiatan Kita belum sepenuhnya memperhatikan keterwakilan gender secara proporsional - Tingkat partisipasi secara merata dalam proses identifikasi dan evaluasi risiko masih kurang antar Perangkat Daerah - Kapasitas dan penguasaan manajemen risiko aparatur pemerintah dan instansi belum 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pemetaan teknis yang secara eksplisit mendorong keterwakilan gender dalam tim pengelolaan risiko - Pelaksanaan tindakan teknis dan evaluasi manajemen risiko belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan spesifik aparatur terdampak jender dan belum terwujud dan - Pemanfaatan data keprajender dalam proses pengembangan dan evaluasi program pembangunan masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya kerja dan pola pengambilan keputusan yang masih berorientasi andal sehingga partisipasi substansi aparatur perempuan dalam proses manajemen risiko belum optimal - Belum terwujud dan jender gender yang masih mempengaruhi ketertarikan wanita aparat pemerintah dalam kegiatan koordinasi, desk CFO dan mentoring 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi secara aparatur pemerintah dan instansi dalam seluruh tahapan pengelolaan manajemen risiko - Meningkatkan penetapan manajemen risiko yang sesuai, efektif, efisien gender dan memperhatikan perbedaan peran serta kebutuhan aparat - Meningkatkan laporan pengendalian dan evaluasi program pembangunan yang telah dilaksanakan, dikomunikasikan dan sesuai terhadap isu gender



No	Aktivitas	Output	Satuan	Anggaran Perubahan (Rp)	Isu Gender			Tujuan aktivitas Responsif Gender
					Data Gender	Faktor Penyebab Langsung	Faktor Penyebab Tidak Langsung	
					merata khususnya pada level pelaksanaan teknis.		<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapatnya perspektif gender dalam sistem informasi dan pelayanan masyarakat terkait 	

3. Sasaran Perangkat Daerah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik serta Kapasitas Daerah

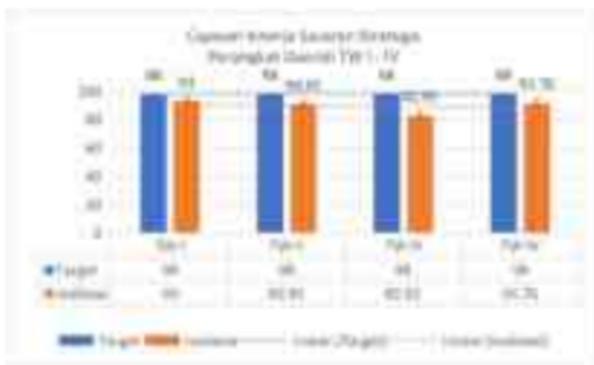
A. Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya.

a. Progres capaian Kinerja Tahun 2025

Progres capaian presentase kerja sama yang terimplementasi tahun 2025 sebesar 91,76% dengan capaian per indikator sebagaimana ditunjukkan dalam table di bawah ini.

Tabel 2.10 Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah

Indikator	Berkas	2024					2025			2024			2025		
		Realisasi	Target												
Proses peningkatan kerjasama kerja sama dengan lembaga internasional dan mitra strategis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



Gambar 2.10 Capaian Kinerja TW1 - IV

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dibandingkan dengan target beberapa tahun terakhir, realisasi indikator kinerja Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.17. Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sasaran Solusiarif Daerah Kota Sukoharjo s.d. Tahun 2025

Indikator	Sasaran	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	Nilai	90	80,8	90	87,04	90	91,97	90	91,76

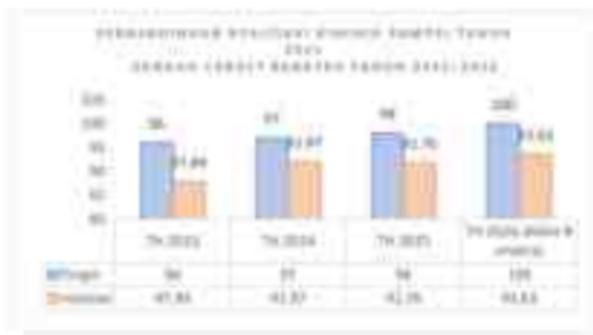
Nilai Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya Pemerintah Kota Sukoharjo ditargetkan meningkat setiap tahun, dari 86% pada tahun 2023 menjadi 90% pada tahun 2025. Namun demikian nilai realisasi cenderung fluktuatif mencapai sebesar 91,76% pada tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2021-2026

Tabel 3.18. Perbandingan realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2021-2026

Indikator	Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi

	Tujuan	Realisasi	Tetapan (%)	Tujuan	Realisasi	Tetapan (%)	Prekualifikasi	Tujuan	Realisasi	Tetapan (%)	Prekualifikasi	Tujuan	Realisasi	Tetapan (%)
Peningkatan kapasitas instansi yang melaksanakan UU/Peraturan lainnya	90	87,66	97,40	97	91,97	94,89	Sangat Baik	90	87,76	97,51	Sangat Baik	100	100,00	100,00



Gambar 3.14. Perbandingan realisasi kinerja setiap tahun 2020 dengan target Rencana Tahun 2021-2025

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan.

Peningkatan realisasi persentase peningkatan kerja sama instansi yang implementasi tahun berikutnya dicapai dengan ketersediaan data dari dokumen kerja sama yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik sebagai dasar tindak lanjut. Selain itu, adanya mekanisme pemantauan dan pelaporan implementasi kerja sama secara berkala memudahkan identifikasi hambatan sejak dini. Dukungan anggaran serta pengawasan



SDM yang jelas juga membantu memastikan kerja sama dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi capaian kinerja, antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pada perangkat daerah pelaksana, perbedaan prioritas antar mitra kerja sama, serta proses administrasi dan birokrasi yang memerlukan waktu relatif panjang. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kecepatan implementasi kerja sama meskipun tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja secara keseluruhan.

Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Daerah Kota Surakarta melakukan penguatan koordinasi, penyederhanaan mekanisme monitoring, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan kegiatan kerja sama daerah serta menjaga keberlanjutan capaian kinerja pada periode berikutnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*men, money, method*).

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia (*Man*)

Penggunaan sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien melalui penggunaan aparatur sesuai dengan tugas dan kompetensi masing-masing. Pembagian peran yang jelas, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemerataan lin kerja yang ada memungkinkan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal tanpa penambahan jumlah pegawai. Kompetensi aparatur yang memadai dan pengalaman dalam pengelolaan kerja sama daerah turut mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.

2. Efisiensi Metode Pelaksanaan (*Method*)

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien melalui penerapan perencanaan yang terukur, pemanfaatan data dan dokumen kerja sama yang terdokumentasi dengan baik, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Penggunaan mekanisme



koordinasi dan pelaporan yang terstruktur memudahkan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta identifikasi kendala sejak dini. Metode kerja yang adaptif terhadap perubahan kebijakan dan anggaran memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif dan sasaran kinerja dapat tercapai secara optimal.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran (Money)

Pemanfaatan anggaran Tahun 2025 dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja. Penyesuaian anggaran pada pertengahan tahun dapat dikelola melalui realokasi dan pengendalian belanja, sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, capaian kinerja tetap dapat memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan adanya kesesuaian antara input anggaran dan output yang dihasilkan.

Tabel 3.19: Efisiensi penggunaan sumber daya

Prog/Keg/ Subkeg	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Mula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Efisiensi (%)	Status Keterkaitan dengan IKU OPD
Fasilitas Kapasitas Daerah						
Fasilitas Kerja - Sama Daerah Negeri						
	Desk Pemetaan Rencana Kerja Sama Daerah Negeri		3.360.000	6.370.000	3.010.000	
	Fasilitas Alat Bahan Peralengkapan Kerja Sama		19.904.000	19.904.000	0	
	Kekubertan Pemerintah Kota Sumbawa Dalam Kerjasama Formedasi Apak Komal & Dan Apak		75.030.000	75.030.000	0	
	Kontribusi Dan Rapat Koordinasi Luar Daerah Dalam Rangka Fasilitas Kerja Sama Daerah Dalam Persiapan Pelanggaran Publik		144.585.649	106.321.881	38.263.768	



Program/ Subbag	Aktivitas	Output (kuantitas)	Anggaran Nilai (Rp)	Anggaran Penunahan (Rp)	Efisiensi (%)	Aspek Keterkaitan dengan IRU OPD
	Penyelenggaraan Rapat Piano Tahun		13.470.000	13.470.000	0	
	Penyelenggaraan Workshop Pemetaan Potensi Rencana Kerja Sama Dalam Negeri		16.000.000	16.000.000	0	
	Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Dalam Negeri		123.120.000	123.120.000	0	
Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri						
	Facilitasi Rapat Koordinasi Hubungan Luar Negeri		3.000.000	3.000.000	0	
	Jurusan Penertanaan Yamu Di Reskrim		8.100.000	8.100.000	0	
	Rakubantam Pemantahan Kota Suralaba Dalam Lingkup Aspek Dari Civic-Op		102.020.000	102.020.000	0	
	Pengelolaan Suwara Dan Cendramaila		10.710.000	0	-	10.710.000
	Pengajaran Desa Pengajaran Hubungan Internasional		117.000.000	50.000.000	-	67.000.000
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						
	Desk Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah		3.100.000	3.100.000	0	
	Rapat Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Kerja Sama Daerah		3.000.000	3.000.000	0	

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kegagalan pencapaian kinerja

Dalam mendukung pencapaian kinerja Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi, dilakukan melalui Program Pemertanaan dan Kosejahteraan Rakyat pada Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri dengan total anggaran Rp493.690.691,00 dan teralisasi sebesar Rp493.287.390,00 atau sebesar 99,91%.

Dukungan manajemen dan fasilitas kerja sama daerah menjadi faktor utama keberhasilan, khususnya melalui kegiatan Desk Pemetaan



Forum Kerja Sama Dusun Negeri, penyusunan dan pembaruan data serta dokumen kerja sama, serta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kerja sama daerah secara berkala. Kegiatan tersebut memastikan setiap kerja sama yang telah ditandatangani dapat diindaklanjuti dan diimplementasikan pada tahun berikutnya sesuai perencanaan.



Gambar 3.18 Monev Kerja Sama Daerah

Koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra kerja sama dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan kerja sama. Adanya dokumentasi kegiatan berupa berita acara, laporan monitoring, data dukung, serta publikasi pada media daring dan cetak menjadi bukti pendukung bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara akuntabel dan terukur. Pemanfaatan anggaran yang diarahkan secara fokus pada kegiatan prioritas juga berkontribusi terhadap keberhasilan capaian kinerja.



Gambar 3.19 Diskusi Pemetaan Prioritas Kerja Sama Dusun Negeri



B. Nilai LPPD

a. Progres capaian Kinerja Tahun 2025

Progres capaian antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 secara triwulanan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20 Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I					Realisasi	Tingkat Pencapaian	Kategori	Triwulan II					Realisasi	Tingkat Pencapaian	Kategori
			1	2	3	4	5				1	2	3	4	5			
1	Nilai LPPD	95%	95	95	95	95	95	3,70	95,00%	Sangat Baik	95	95	95	95	95	3,70	95,00%	Sangat Baik

Progres capaian Nilai LPPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 selama Triwulan I dihitung menggunakan Nilai LPPD Tahun 2023. Sedangkan mulai Triwulan II Hasil Evaluasi LPPD Tahun 2024 sebesar 3,70 yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada saat hari GTDA Tahun 2025. Sehingga capaian tahun 2025 sebesar 95,74% dengan kategori sangat berhasil.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi indikator kinerja Nilai LPPD apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tren selalu meningkat. Hal ini, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21 Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Baseline Pemerintah Daerah Kota Surabaya s.d. Tahun 2025

Indikator	Basis	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Realisasi

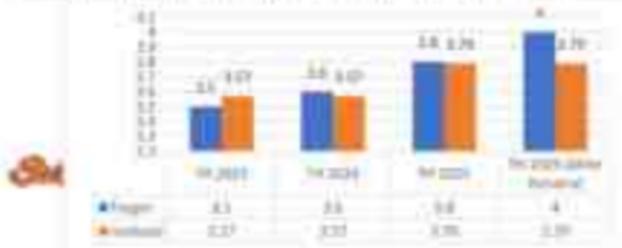
Nilai LPPD	Nilai	3,4	3,4035	3,5	3,57	3,6	3,57	3,8	3,79
------------	-------	-----	--------	-----	------	-----	------	-----	------

Nilai LPPD Pemerintah Kota Surakarta ditargetkan meningkat setiap tahun, dan 3,4 pada tahun 2022 menjadi 3,79 pada tahun 2025. Peningkatan realisasi nilai LPPD dicapai melalui keefektifan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja OPD dengan indikator LPPD, yang didukung oleh data yang valid dan tepat waktu. Selain itu, penguatan koordinasi lintas OPD serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya turut mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surakarta berhasil meraih nilai LPPD sebesar 3,79 dan memperoleh predikat terbaik secara nasional.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2021–2026

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian indikator Nilai LPPD dengan Arah Reformasi

Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2025 (Arah Reformasi)	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Nilai LPPD	Nilai	3,5	3,57	102	3,6	3,57	99,17	3,6	3,79	105,28	4	64,71
		Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2021–2026										Sangat Berhasil





Gambar 3.17 Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target Rencana Tahun 2021-2026

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan.

Peningkatan kinerja LPPD pada umumnya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang mencakup kejelasan pembagian kewenangan dan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, keselarasan perencanaan dan indikator kinerja dengan dokumen RPJMD, RKPD, dan Renstra DPD, kapasitas serta pemahaman SDM terhadap substansi urusan dan indikator LPPD, ketersediaan dan validitas data pendukung yang konsisten, dukungan penganggaran dan ketepatan pelaksanaan program/kegiatan termasuk dampak refoocusing anggaran, komitmen dan peran kepemimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi, serta kesiapan regulasi daerah dan kemampuan penyesuaian terhadap kebijakan pusat.

Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Surakarta, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. Salah satu kendala utama adalah diterbitkannya pedoman penyusunan LPPD dari Kementerian Dalam Negeri yang waktunya nihil berdekalan dengan tahun pelaporan. Kondisi



tersebut berdampak pada terbatasnya waktu bagi perangkat daerah dan Tim Penyusun untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan ketentuan terbaru dalam proses penyusunan dokumen LPPD. Selain itu, terdapat perubahan pada beberapa indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dipenuhi dalam LPPD. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian data, metode pengukuran, serta mekanisme pelaporan oleh perangkat daerah, sehingga berpengaruh terhadap kelancaran dan ketepatan waktu pengumpulan data. Faktor penghambat lainnya adalah masih perlunya penyamaan persepsi terkait definisi operasional Indikator Kinerja Kunci (IKK). Perbedaan pemahaman antar perangkat daerah mengenai definisi, cakupan, dan cara pengukuran IKK berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penyajian data, sehingga memerlukan koordinasi dan klarifikasi yang lebih intensif dalam proses penyusunan LPPD.

Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia serta dukungan anggaran juga menjadi tantangan dalam penyusunan LPPD. Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan koordinasi, pendampingan teknis, serta pengolahan dan verifikasi data yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen LPPD yang berkualitas.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Surakarta Tahun 2025 diawali dengan tahapan persiapan. Pada tahap ini, Tim Penyusun melaksanakan kegiatan asistensi penyusunan LPPD dengan menghadirkan narasumber dari Biro Pemutakhiran Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan asistensi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Tim Penyusun terhadap kebijakan, pedoman, serta teknis penyusunan LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dan tahap persiapan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LPPD. Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyampaikan



data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada bulan Januari, dilakukan pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan LPPD Kota Surabaya. Pembentukan tim ini dimaksudkan untuk mempercepat pembagian tugas, tanggung jawab, serta koordinasi antar perangkat daerah agar proses penyusunan LPPD dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Selanjutnya, Tim Penyusun melaksanakan desk sinkronisasi data bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian, konsistensi, dan ketepatan data yang disajikan, baik dari sisi substansi, format, maupun dukungan data elektronik, sehingga data yang digunakan dalam LPPD valid dan selaras antar perangkat daerah.

Berdasarkan hasil desk sinkronisasi, Tim Penyusun melakukan penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini memuat berbagai indikator kinerja dan capaian yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya selama periode pelaporan dan menjadi dasar utama dalam penyusunan dokumen LPPD.

Dokumen LPPD yang telah disusun kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, serta kepatuhan dokumen LPPD terhadap ketentuan dan standar yang berlaku. Hasil verifikasi Tim APIP dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dokumen.

Mendiantarjuti CHR dari Tim APIP, Tim Penyusun melaksanakan penyusunan rancangan akhir LPPD Kota Surabaya dengan melakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Rancangan LPPD yang telah diampunakan selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota Surabaya sebagai dokumen resmi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Tahapan akhir dan seluruh rangkaian kegiatan ini adalah penyampaian LPPD Kota Surakarta kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, method*).

Tambah tabel efisiensi tapem

1. Sumber Daya Manusia (*Man*)

Ditunjukkan melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi, pembagian tugas yang jelas, serta optimisasi koordinasi antar perangkat daerah, sehingga pelaksanaan program dan penyusunan laporan kinerja dapat berjalan efektif tanpa duplikasi pekerjaan, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis untuk menjaga kesinambungan kinerja akbal rotasi atau mutasi pegawai

2. Efisiensi Metode Kerja (*Method*)

Ditunjukkan melalui penerapan standar operasional prosedur, pemanfaatan sistem informasi dan format pelaporan yang terstandarisasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis, tepat waktu, dan akuntabel.

3. Efisiensi penggunaan Anggaran (*Money*)

Tercermin dari pengalokasian belanja yang lebih difokuskan pada program dan kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja, dengan pengendalian biaya dan penyesuaian strategi pelaksanaan pada kondisi keterbatasan atau



refocusing anggaran agar target kinerja tetap dapat dicapai secara optimal.

Tabel 3.23 Efisiensi penggunaan sumber daya

Peng'Kuat' Subbag	Aktivitas	Output (setahun)	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Pembekuan (Rp)	efisiensi (-/+ %)	Analisa keterkaitan dengan RCU OPD
Administrasi Tata Pengelolaan						
Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah						
	Anggota Pembidang Administrasi dan Koordinasi Otonomi Daerah		0	133.700.000	133.700.000	
	Fasilitas Administrasi Dan Koordinasi Otonomi Daerah		16.900.000	0	-16.900.000	
	Fasilitas Konsultasi SAPD Otonomi Daerah		291.074.973	0	-291.074.973	
	LKP2 - Cetak Buku LKPJ Wakilra		41.790.000	41.790.000	0	
	LKPJ - Cetak Buku Nota Jawaban LKPJ Wakilra		3.480.000	3.480.000	0	
	LKPJ - Cetak Buku Nota Pengantar LKPJ Wakilra		3.384.000	3.384.000	0	



Profil Kegiatan Subbag	Aktivitas	Output (Setoran)	Anggaran Mula (Rp)	Anggaran Penyesuaian (Rp)	SEKOP (Rp)	Analisa Keterkaitan dengan RLPD
	LKPJ - Penyelenggaraan Dokumen LKPJ Wilayah		20.000.000	20.000.000	0	
	LPPD - Asistensi Penyelenggaraan LPPD		8.395.000	8.395.000	0	
	LPPD - Cetak Buku LPPD		8.622.400	8.622.400	0	
	LPPD - Penyelenggaraan Dokumen LPPD		32.400.000	32.400.000	0	
	LPPD - RLPPD - Penyelenggaraan RLPPD Lokal		0	27.010.000	27.010.000	
	LPPD - RLPPD - Penyelenggaraan RLPPD Nasional		0	10.000.000	10.000.000	
	LPPD - RLPPD - Penyelenggaraan RLPPD Regional		0	27.528.000	27.528.000	
	LPPD - RLPPD - Penyelenggaraan Dokumen RLPPD		2.250.000	2.250.000	0	
	Penyelenggaraan Buku Manual Jabatan		0	22.250.000	22.250.000	
	SPM - Asistensi Penyelenggaraan SPM		8.140.000	8.140.000	0	
	SPM - Penyelenggaraan Dokumen Laporan Penerapan		2.200.000	8.277.000	2.077.000	



Program/Kep/ Subkeg	Aktivitas	Output (Setiahun)	Anggaran Mula (Rp)	Anggaran Realisasi (Rp)	SEKOP (x/1)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan (R/ G)
	SPM					

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian kinerja Nilai LPPD dilakukan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan total anggaran Rp1.478.001.030,00 dan realisasi sebesar Rp1.286.576.698,00 atau sebesar 87,72%.

Hasil Ringkasan Laporan Penyotongan/Femerintahan Daerah (RLPPO) telah didokumentasikan secara resmi dan dipublikasikan melalui media cetak yang ditayangkan pada surat kabar Suara Merdeka, Solopos, dan Tribun Online sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan selama tahun 2025 untuk mendukung tercapainya peningkatan Nilai LPPD Pemerintah Kota Surakarta seperti Asistensi Penyusunan LPPD bagi pejabat/personil yang menangani LPPD pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Biro Pemerintahan Oda dan kerjasama Sotda Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.10 Aarsistem/ persiapan LPPD Tahun 2025

B. Nilai SAKIP

a. Progres capaian Kinerja Tahun 2025

Progres capaian Nilai SAKIP Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2025 selama Triwulan I s.d. Triwulan III dihitung menggunakan Nilai SAKIP Tahun 2024 dengan target yang disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 sampai saat ini belum keluar, masih menunggu penitisan dari Kementerian PANRB tanggal 3 September 2024. Triwulan IV sudah menggunakan target tahun 2025.

Tabel 2.34 Progres Capaian Aksi, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025. Daerah Strategis Mengembangkan Wawasan/Kebijakan dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Karakter Daerah

Indikator A	Sub-Indikator B	TASAP					TAK			TAK			TAK					
		1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Nilai SAKIP	Nilai	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22



Target Nilai SAKIP Pemerintah Kota Surakarta selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 55 di tahun 2025 meningkat menjadi 60. Namun realisasi nilai Sakip masih dibawah target Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, baik dari sisi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, maupun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dengan adanya tindak lanjut perbaikan tersebut, Nilai SAKIP Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2025 masih 72 dengan capaian sebesar 80%.

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi indikator Nilai SAKIP dilihat beberapa tahun terakhir belum bisa mencapai target. Jika dilihat dari tren tahun 2022 hingga tahun 2025 realisasi Nilai SAKIP mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Sedangkan target Nilai SAKIP selalu meningkat secara signifikan setiap tahunnya dan telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

Tabel 3.25 Perbandingan target dan realisasi Capaian Kinerja Sesuai Strategi Kebijakan Daerah Kota Surakarta s.d. Tahun 2025

Indikator	Satuan	2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		t	g	t	g	t	g	t	g
Nilai SAKIP	Nilai	75	70,34	80	70,81	85	72	90	72



c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2021-2026

Tabel 2.25 Perbandingan Capaian Indikator Nilai SAKIP dengan Akhir Renstra

Indikator	Satuan	2023			2024			2025			Tahun 2025 (Aksi-Rencana)	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Nilai SAKIP	Nilai	80	75,81	88,81	88	72	84,75	90	72	88	95	75,78

Indikator Nilai SAKIP tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir tahun dokumen perencanaan yaitu 95 tercapai 75,78%, dengan kategori Bermasalah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong pencapaian kinerja antara lain adanya koordinasi yang terjalin antar perangkat daerah pengampu SAKIP seperti Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Organisasi untuk melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, seperti:

1. telah dilakukan perbaikan penyusunan indikator kinerja dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025- 2029 dengan formulasi dan metode indikator yang jelas dan memastikan indikator kinerja memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur dan menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran
2. telah dilakukan pendampingan penyempurnaan portofolio kinerja level kota sampai dengan level perangkat daerah
3. telah dilakukan penyelesaian target kinerja dengan memanfaatkan hasil monitoring capaian kinerja telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan



4. memastikan tindak lanjut hasil evaluasi internal oleh APIP telah dilaksanakan baik di level kota maupun perangkat daerah.

Adapun yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja:

1. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta berakhir di tahun 2026, sehingga rekomendasi perbaikan AKIP tahun 2024 dari sisi perencanaan kinerja tidak bisa secara maksimal dilaksanakan di tahun 2025.
2. masih terdapat indikator yang belum memenuhi kriteria SMART dan beberapa indikator yang ditetapkan dalam Perwali Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta yang ditetapkan tahun 2021 memiliki definisi operasional yang sudah berubah dengan perubahan teknis yang mengatur, sehingga mempengaruhi cara pengukuran kinerja.
3. penyusunan laporan kinerja baik level kota maupun level perangkat daerah belum sepenuhnya memberikan informasi yang mendukung capaian kinerja.
4. evaluasi internal telah dilakukan namun belum menyajikan rekomendasi yang cukup untuk perbaikan implementasi SAKIP pada perangkat daerah.

Dalam upaya pencapaian target Nilai SAKIP Pemerintah Kota Surakarta, Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran maupun metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (man, money, method).

1. Sumber Daya Manusia (Man)

Dari sisi sumber daya manusia (man), Sekretariat Daerah Kota Surakarta memanfaatkan aparatur yang memiliki tugas dan fungsi terkait SAKIP secara kolaboratif dengan perangkat daerah pengampu, seperti Bappeda, Inspektorat, dan BPKAD. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui workshop, pendampingan teknis, serta desk capaian.



kinerja secara rutin, sehingga SOM yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa penambahan personel baru.

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran (Money)

Dari sisi anggaran (money), penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP, seperti workshop eSAKIP, mentoring dan evaluasi kinerja, serta desk capaian kinerja triwulanan. Penyesuaian anggaran yang terjadi pada pertengahan tahun idespons melalui pengendalian belanja dan realokasi kegiatan, sehingga keterbatasan anggaran tidak menghambat pelaksanaan kegiatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan output dan outcome yang mendukung sasaran strategis.

3. Efisiensi Metode Pelaksanaan (Method)

Sementara dari sisi metode (method), penerapan sistem eSAKIP yang terintegrasi dengan SIPPD serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala menjadi metode utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja. Metode desk capaian kinerja dan evaluasi internal secara periodik memungkinkan identifikasi permasalahan dan tindak lanjut perbaikan secara cepat. Dengan metode kerja tersebut, proses pengendalian kinerja dapat dilakukan secara lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan metode kerja telah dilaksanakan secara efisien dan saling mendukung, meskipun capaian Nilai SAKIP Tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target. Efisiensi ini menjadi modal penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada periode selanjutnya.



Taber 3.27 Efisiensi penggunaan sumber daya

Program/ Subring	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Mula (Rp)	Anggaran Penutupan (Rp)	Efisiensi (%)	Analisis Keterkaitan dengan RKD OPD
Program Penunjang Utama Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah						
Kegiatan Penataan Organisasi						
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			294.417.500	181.120.101	61,247,308	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sorokabo	dokumen	142.918.100	75.670.701	67,247,308	
	Mentoring dan Evaluasi Penerimaan Budaya Kerja	dokumen	105.408.400	105.408.400	0	
Koordinasi dan Pengawasan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			408.895.100	482.885.100	-6.000.000	Tidak berpengaruh terhadap pencapaian RKD
	Penyusunan RKD/KL di Lingkungan Pemerintah Kota Sorokabo	dokumen	231.512.000	227.512.000	-4.000.000	Tidak berpengaruh terhadap pencapaian RKD

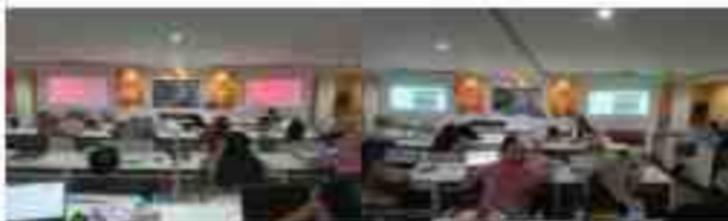


Program/ Kegiatan	Aktivitas	Output (satuan)	Anggaran Mula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Ekstensi (+/-)	Analisis Keterkaitan dengan RKD DMD
	Penyusunan SAKIP Kota Surakarta	1 dokumen	225.363.100	225.363.100	0	

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian nilai SAKIP didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Penataan Organisasi dengan pagu anggaran Rp. 1.634.621.101,00 dan realisasi sebesar Rp1.333.495.984,00 atau sebesar 81,56%.

Dalam Pencapaian Kinerja Nilai SAKIP, dilakukan melalui Beberapa kegiatan telah dilaksanakan selama tahun 2025, untuk mendukung tercapainya peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Kota Surakarta melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Penataan Organisasi. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain Workshop eSAKIP bagi pejabat/pejabat yang menangani perencanaan pada 36 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Workshop eSAKIP Tahun 2025 dilaksanakan pada 20 November 2025 dengan materi Penyusunan Dokumen Pejerjian Kinerja dan Rekapitulasi Perubahan Anggaran dan Target Kinerja, serta Pembangunan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi eSAKIP yang terintegrasi dengan sistem perencanaan SIPPD yang dikembangkan oleh Bappeda Kota Surakarta.



Gambar 3.19. Workshop eSAKIP Tahun 2025

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dilakukan secara rutin melalui aplikasi eSAKIP pada minggu pertama setelah triwulan berakhir. Dilakukan Desk Capaian Kinerja setiap triwulan untuk verifikasi capaian kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaporkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) serta menjadi dasar pemberian TPF ASN.



Gambar 3.20. Desk Capaian Kinerja Tahun 2025 Triwulan I-III

B. Realisasi Anggaran

Total pagu awal Sekretariat Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp72.317.444.812,00 dan diresinansiasi menjadi Rp66.829.570.730,00 serta realisasi sebesar Rp57.803.573.848,00 atau sebesar 86,58%.

Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
	TOTAL PAGU/ SUB UNIT	72.317.444.812	66.829.570.730	57.803.573.848
	TOTAL PAGU/ PROGRAM	72.317.444.812	66.829.570.730	57.803.573.848
	TOTAL PAGU/ KEGIATAN	72.317.444.812	66.829.570.730	57.803.573.848
	TOTAL PAGU/ SUB KEGIATAN	72.317.444.812	66.829.570.730	57.803.573.848



No.	Program	Anggaran (Rp)		Revisi Korupsi (Rp)
		Sebelum	Setelah	
4.01.2.00.0.00.01.0001	SEKRETARIAT DINERAS	26.029.000.000	26.079.070.040	24.076.795.837
	PROGRAM POKJAWAB DIRJANS PENGEMBANGAN DAERAH	26.029.000.000	26.079.070.040	24.076.795.837
4.01.21.2.02	Administrasi Keuangan Negeri/daerah Daerah	23.097.041.000	23.761.000.000	23.095.374.000
4.01.21.2.02.0001	Persediaan Gaj dan Tunjangan ASN	23.097.041.000	23.761.000.000	23.095.374.000
4.01.21.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Negara Daerah dan Wakil Kepala Daerah	828.019.800	828.019.800	793.421.701
4.01.21.2.11.0001	Persediaan Gaj dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	828.019.800	828.019.800	793.421.701
4.01.2.00.0.00.01.0001	SAGIAN DIRJANSASAB	1.807.000.000	1.834.021.010	1.333.499.904
	PROGRAM POKJAWAB DIRJANS PENGEMBANGAN DAERAH	1.807.000.000	1.834.021.010	1.333.499.904
4.01.21.0.13	Pelayanan (Pengisian)	1.807.000.000	1.834.021.010	1.333.499.904
4.01.21.2.13.0001	Pengadaan Kebutuhan dan Anjak Piutang	400.070.000	398.400.000	395.752.600
4.01.21.2.13.0002	Facilities Pelayanan Publik dan Tata Laksana	290.220.000	290.010.000	294.000.000
4.01.21.2.13.0003	Pengelolaan Risiko dan Belanja Bayaran	246.410.000	245.150.000	247.800.000
4.01.21.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	420.500.000	391.800.000	391.800.000
4.01.21.2.13.0005	Kontribusi dan Pelayanan Layanan Kerja Pemerintah Daerah	408.990.000	402.000.000	346.340.000
4.01.2.00.0.00.01.0002	REKAM-REKAM DAERAH	1.805.779.800	1.749.344.840	1.267.498.015
	PROGRAM PEMBERANTARAN/AN/GAN KESEJAHTERAAN/DA/RYAT	1.805.779.800	1.749.344.840	1.267.498.015
4.01.22.2.03	Facilities dan Rombak Rumah	1.749.344.840	1.749.344.840	1.267.498.015
4.01.22.2.03.0001	Facilities Perumahan Rumah Rakyat Daerah	370.082.000	370.000.000	367.004.000
4.01.22.2.03.0002	Facilities Rumah Rakyat	1.020.200.000	940.440.000	610.000.000
4.01.22.2.03.0003	Pembangunan dan Perak Makam dan Pengadaan Infantri Makam	462.612.840	448.904.840	370.494.015
4.01.6.00.0.00.01.0002	SAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	518.097.000	518.097.000	217.734.700
	PROGRAM PEKERJAAN/DA/RYAT PEMBANGUNAN	518.097.000	518.097.000	217.734.700
4.01.22.2.02	Pekerjaan Administrasi Pembangunan	518.097.000	518.097.000	217.734.700
4.01.22.2.02.0001	Facilities Perumahan Program Pembangunan	23.000.000	23.000.000	17.000.000
4.01.22.2.02.0002	Pengelolaan dan Evaluasi Program Pembangunan	204.040.000	199.720.000	177.000.000
4.01.22.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	110.000.000	97.170.000	62.375.000
4.01.2.00.0.00.01.0004	SAGIAN KESEJAHTERAAN/DA/RYAT	3.418.010.000	3.318.200.040	3.295.330.017
	PROGRAM PEMBERANTARAN/AN/GAN KESEJAHTERAAN/DA/RYAT	3.418.010.000	3.318.200.040	3.295.330.017



No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
4.01.22.2.22	Pelembagaan Kabupaten Kepulauan Riau	2.410.710.720	2.818.200.240	1.000.332.017
4.01.22.2.22.0001	Fasilitas Pengeluaran dan Manfaat Spesial	2.080.341.220	2.488.010.320	2.080.322.017
4.01.22.2.22.0002	Pelembagaan Kabupaten Evakuasi dan Capaian Kinerja Tahun Kelembagaan Sempit	1.800.030.820	2.108.890.820	2.000.722.000
4.01.22.2.22.0000	Pelembagaan Kabupaten Evakuasi dan Capaian Kinerja Tahun Kelembagaan Marcaraku	22.980.000	19.480.000	4.670.000
4.01.2.000.2.00.01.0000	SALINAN TATA KELOLA (TAMBAH)	35.194.383.492	1.971.691.711	1.705.944.295
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DAN PERKOTAAN (MAYOR)		42.194.383.492	1.971.691.711	1.705.944.295
4.01.22.2.21	Administrasi Tata Pemerintahan	8.517.528.832	1.478.031.120	1.248.574.699
4.01.22.2.21.0000	Pengelolaan Administrasi Kelembagaan	9.041.242.480	1.322.724.284	894.882.205
4.01.22.2.21.0000	Fasilitas Pelembagaan (Tahun Dasar)	495.998.272	275.286.778	301.894.280
4.01.22.2.24	Fasilitas Kerja Sama Daerah	888.684.640	493.000.881	403.287.200
4.01.22.2.24.0001	Fasilitas Kerja Sama Daerah Negeri	388.324.840	210.270.001	220.871.140
4.01.22.2.24.0002	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	246.200.280	172.730.880	186.577.285
4.01.22.2.24.0000	Evakuasi Pelembagaan Kerja Sama	12.700.000	12.700.000	10.840.000
4.01.2.000.2.00.01.0000	SALINAN PROPOSAL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI (MAYOR)	6.411.922.880	6.027.967.880	4.289.934.111
PROGRAM PERKOTAAN (MAYOR)		6.411.922.880	6.027.967.880	4.289.934.111
4.01.21.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Rumah Daerah dan Wakil Kepala Daerah	421.712.300	483.960.000	113.880.000
4.01.21.2.11.0000	Penyediaan Pekerjaan Dinas dan Akutik Kewilayahan Rumah Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30.712.300	120.000.000	113.880.000
4.01.21.2.11.0000	Pelaksanaan Monev Check Up Kinerja Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	40.000.000	-
4.01.21.2.12	Fasilitas Konektivitas dan Sekunder Daerah	2.715.730.800	2.124.480.800	2.402.284.221
4.01.21.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	520.000.000	520.000.000	514.249.000
4.01.21.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	480.000.000	480.000.000	421.499.200
4.01.21.2.12.0000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekunder Daerah	1.715.730.800	2.144.480.800	1.866.536.021
4.01.21.2.14	Pelaksanaan Program dan Komunikasi Program	2.574.462.180	2.721.062.180	2.326.728.440
4.01.21.2.14.0001	Fasilitas Kegiatan	968.222.500	808.712.000	807.587.200
4.01.21.2.14.0002	Fasilitas Komunikasi	821.900.000	1.111.750.000	912.201.170
4.01.21.2.14.0000	Perakumulasi Tugas Program	770.074.180	790.200.180	611.920.070
4.01.2.000.2.00.01.0001	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	241.122.640	243.288.475	234.818.200



No.	Program	Anggaran (Rp)		Revisi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
	PROGRAM PEMBERKONDISIAN			
	PELAKSANAAN	241.723.949	242.208.475	254.818.202
4.01.22.2.23	Perencanaan Perawatan Rawat Inap dan Jans	241.723.949	242.208.475	254.818.202
4.01.22.2.23.0001	Perencanaan Perawatan Rawat Inap dan Jans	132.933.349	494.347,5	70.389.100
4.01.22.2.23.0002	Perencanaan Layanan Hospitalisasi Rawat Inap dan Jans	83.200.000	58.000.000	68.884.200
4.01.22.2.23.0003	Perencanaan dan Aktivasi Perawatan Rawat Inap dan Jans	164.590.600	114.209.950	705.881.600
4.01.22.2.23.0004	PELAKSANAAN	25.226.210.274	21.873.013.568	11.911.838.708
	PROGRAM PELAKSANAAN IHTISAN			
	PELAKSANAAN IHTISAN	31.036.570.274	21.873.013.568	11.911.838.708
4.01.21.2.21	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak	179.824.300	144.822.300	101.523.700
4.01.21.2.21.0001	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak	164.329.300	128.070.000	101.284.700
4.01.21.2.21.0002	Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelaporan Kinerja (SKPD)	15.495.000	16.752.300	1.275.000
4.01.21.2.21.0003	Administrasi Keuangan Perangkat Lunak	17.181.000	17.181.000	2.375.000
4.01.21.2.21.0004	Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Substansi Terhadap Berprestasi SKPD	17.181.000	17.181.000	2.375.000
4.01.21.2.21.0005	Administrasi Keuangan Perangkat Lunak	124.607.000	124.607.000	63.671.200
4.01.21.2.21.0006	Perencanaan Proses Bisnis Berbasis Risiko dan Analisis Kelembagaan			-
4.01.21.2.21.0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Lunak	154.607.000	154.607.000	63.671.200
4.01.21.2.21.0008	Administrasi Sistem Perangkat Lunak	2.688.882.994	2.817.021.747	2.047.824.888
4.01.21.2.21.0009	Penyediaan Kelembagaan Sistem dan Perangkat Lunak	86.174.000	86.174.000	87.387.180
4.01.21.2.21.0010	Penyediaan Fasilitas dan Perangkat Lunak	148.725.710	148.725.710	1.03.667.341
4.01.21.2.21.0011	Penyediaan Ruang Gakam dan Perencanaan	208.638.000	208.638.000	208.661.212
4.01.21.2.21.0012	Penyediaan Sistem Basis dan Perangkat Lunak			-
4.01.21.2.21.0013	Perencanaan Ruang Konfirmasi dan Administrasi SKPD	2.230.946.864	2.141.080.547	1.020.822.974
4.01.21.2.21.0014	Perencanaan Ruang Perencanaan Perangkat Lunak	1.425.487.380	1.814.019.710	1.280.323.820
4.01.21.2.21.0015	Perencanaan Mutu	1.887.231.380	823.881.710	618.728.400
4.01.21.2.21.0016	Perencanaan Pemasangan Mesin Lunak	398.286.000	654.732.000	621.555.380
4.01.21.2.21.0017	Perencanaan Ruang dan Pemasangan Perangkat Lunak dan Perangkat Lunak			-
4.01.21.2.21.0018	Perencanaan Ruang Perencanaan Ruang Konfirmasi dan Administrasi SKPD	61.365.721.010	10.380.988.110	6.210.987.820



No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)
		Sebelum	Setelah	
4.01.21.2.01.0001	Penyediaan Jasa Surat Menjual	40.493.420	40.493.420	10.183.400
4.01.21.2.01.0002	Penyediaan Jasa Kimbaliat, Surat Gaji dan Surat Lain-lain	3.676.266.550	3.667.014.300	2.270.849.290
4.01.21.2.01.0003	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peningkatan Fisik	150.504.180	170.214.180	103.914.150
4.01.21.2.01.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Sistem Rantai	6.481.812.000	6.387.036.100	5.749.482.400
4.01.21.2.01.0005	Pembinaan Bangun Baru Dasar Peningkatan Kualitas Pemasokan Dasar	2.368.735.710	2.342.158.200	2.210.438.810
4.01.21.2.01.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Kerusakan Perangkoan Dasar dan Kerusakan Dasar Lainnya	1.428.264.710	1.422.260.710	1.100.488.094
4.01.21.2.01.0007	Pembelahan Aset	60.700.000	41.300.000	60.700.000
4.01.21.2.01.0008	Pembelahan/penjualan Bangun Rantai dan Bangunan Lainnya	3.494.838.550	3.073.646.300	3.070.087.200
4.01.21.2.01.0010	Pembelahan/penjualan Bangun dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	388.874.000	197.789.000	406.660.340
4.01.21.2.01.0011	Pembelahan/penjualan Bangun dan Peralatan Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000	7.000.000	5.500.000
4.01.21.01.01.01.0011	BAGIAN PERENCANAAN DAN SIMBOLISASI	357.284.300	319.088.400	386.811.520
4.01.21.01.01.01.0012	PROGAM PERENCANAAN DAN PENYOSISIASI	357.284.300	319.088.400	386.811.520
4.01.21.2.1	Penjualan Kembali Perakunan	346.024.000	388.710.100	207.338.200
4.01.22.2.01.0001	Kontribusi, Sumbangan, Hibah, Bantuan, Pengadaan BMD dan BMD	142.041.000	117.900.000	146.103.000
4.01.22.2.01.0002	Pengadaan dan Distribusi Perakunan	71.693.000	64.200.000	94.782.000
4.01.22.2.01.0003	Pembelahan dan Pengadaan Energi Mula Mula	109.371.000	107.670.500	16.434.000
4.01.22.2.04	Pembelahan Kelengkapan Surat Daya Baru	210.980.200	221.270.200	130.472.000
4.01.22.2.04.0001	Kontribusi, Sumbangan dan Capital Kelengkapan Perbaikan, Peralatan, Koneksi, dan Perbaikan	160.760.000	163.760.000	110.677.000
4.01.22.2.04.0002	Kontribusi, Sumbangan dan Capital Kelengkapan Energi Baru	50.220.200	57.510.200	20.795.000
TOTAL RINCI BE BERTAM		72.211.444.812	66.828.270.730	57.362.273.396



C. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi kinerja adalah analisis yang membandingkan antara capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah pendukung. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian tujuan, dapat diketahui dari capaian tujuan dari anggaran yang direalisasikan pada Sekretariat Daerah tahun 2025, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.29 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Gesam	Indikator	Capaian Kinerja			Rencana				
			Target	Riil/Realisasi	%	Program	Anggaran Murni	Anggaran Pinalty/Berkur	Riil/Realisasi	%
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif	Maklumat Kelengkapan Pemerintah Kota	90,74	50,94	100,39	Program Perukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.907.105.502	1.434.821.101	1.333.450.994	61,57
		Pemenuhan kewajiban kerjasama daerah yang terdapat dalam (3)	10	41,62	416,2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.190.943.482	2.161.732.061	1.769.864.089	82,26
				Rata-rata	205,3		12.098.048.984	3.796.553.162	3.103.315.073	82,18
2	Meningkatkan nilai dan potensi sumberdaya Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintahan Daerah	Level NRI	3,18	3,18	100,33	Perencanaan Dan Pelaksanaan	352.447.298	318.897.266	280.269.700	88,18
					Rata-rata	100,33		352.447.298	318.897.266	280.269.700



No	Sasaran Strategis/Gesam	Indikator	Capaian Kinerja			Berkas				
			Target	Realisasi	%	Program	Anggaran Mula	Anggaran (Penutupan)	Realisasi	%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Nas LKPD	1.8	1.79	99.74	Program Peningkatan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.190.943.482	2.161.732.091	1.792.864.089	82,90
		Nas SAKP	90	72	80,000	Program Perancangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.907.105.302	1.434.821.101	1.334.60984	81,07
		Penyusunan perangkatan serta dasar yang implementasi dan berkualitas	98	81,76	83,63	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.190.943.482	2.161.732.091	1.798.864.089	82,90
		Rata-rata		81,12		22.298.992.466	5.598.285.293	4.913.234.162,00	82,37	



Berikut ini disajikan data terkait dengan efisiensi anggaran untuk pencapaian tujuan/indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Tabel 3.30 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis/Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian (1)	Persentase Rata-rata Realisasi Anggaran (2)	Tingkat Efisiensi (3*1-2)
1	Tercapainya brokasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif	2	87,12%	82,18%	14,94 %
2	Mengoptimalkan risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Petertugas Daerah	1	100,33%	90,15%	90,15%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	3	100,30%	82,35%	23,05 %

Berdasarkan tabel diatas dari 3 sasaran strategis dan sasaran PD, rata-rata kinerja capaian kinerja seluruh sasaran melebihi realisasi anggaran.

D. Capaian Kinerja Regulasi

Selama tahun 2025, terdapat beberapa regulasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah baik berupa perda maupun peraturan wali kota, berikut disajikan regulasi yang ditetapkan yang mengatur pihak eksternal dan berdampak langsung pada masyarakat.

Tabel 3.31 Rangkuman regulasi yang ditetapkan tahun 2025

No.	Peraturan Perwali	Waktu Cerealisasi	Substansi Pengaturan	Kaitannya dengan Program
1	PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN	3 Maret 2025	Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2025 mengatur perubahan pedoman pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) khususnya penyelesaian besaran alokasi base nasional LPMB berdasarkan jumlah RW serta penegasan alokasi akhisi dasar dan proporsional untuk kepastian-unggulan dan orientasi-kelurahan	Peraturan ini mendukung program pemerintahan daerah dengan memperkuat tata kelola dan pemertanian pembangunan di tingkat kelurahan, sehingga pemantauan berbasis masyarakat (Masyarakat) dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



No.	Perihal Perawat	Waktu Persewaan	Subsumber Penghasilan	Keterkaitan dengan Program
2.	Peraturan Wali Kota 12 Sukoharjo Nomor 30 Agustus Tahun 2025 tentang 2025 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		Peraturan Wali Kota Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2025 mengukuhkan lembaga Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terdiri dari pengurusan terkait jenis LKK, pembentukan LKK, kedudukan tugas dan fungsi dan LKK, Masa bakti, hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan LKK. Selain itu juga mengukuhkan tentang sumber pendanaan LKK, petunjuk teknis pelaksanaan APBD untuk LKK di Kota Sukoharjo	sebagai program melalui kegiatan prioritas di lingkungan mereka Peraturan ini mendukung program pemeliharaan daerah dengan memperkuat tata kelola dan keberlanjutan LKK, sehingga pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di ruang lingkup kelurahan.

E. PENCAPAIAN LAINNYA

Pada tahun 2025, Sekretariat Daerah Kota Sukoharjo berhasil meraih penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sukoharjo menerima Plagam Penghargaan Juara 1 Lomba Penyelenggaraan Statistik Sekorasi Kota Sukoharjo Tahun 2025 oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tanggal 10 Juli 2025 s.d 12 Agustus 2025 di Kota Sukoharjo.



Gambar 3.21 Penghargaan Juara 7 Lomba Peningkatan
Statistik Sektor Kota Surakarta Th 2025

2. Pemerintah Kota Surakarta menerima Penghargaan Proklamasi Bulan Desember Tahun 2025



Gambar 3.22 Gaerba Penghargaan Proklamasi (Program Kampung Kita) Tahun 2025

3. Penghargaan Sekda Terbaik



Gambar 3.23. Penghargaan Sekda Terbaik

4. Bagian/Umum mendapatkan penghargaan Juara II Penyusunan Laporan Keuangan



Gambar 3.24. Penghargaan Juara II Penyusunan Laporan Keuangan



Bagian umum menetapkan Sertifikat Penghargaan Juara 1 Indeks Tata Kelola Pengawasan Kategori Entitas Kecil



Gambar 3.25 Penghargaan Juara 1 Indeks Tata Kelola Pengawasan



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 diukur melalui pencapaian target kinerja indikator sasaran strategis dan sasaran perangkat daerah yang meliputi 2 indikator sasaran strategis dan 4 indikator sasaran perangkat daerah dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 149,38% (sangat berhasil). Rincian capaian kinerja per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelambagaan Pemerintah Kota	100,39%
		Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	418,2%
2	Menjaga nilai dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MWI	105,33%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	93,83%
		Nilai LPPD	95,74%
		Nilai SAKIP	80,00%
		Rata-rata capaian	149,38%

Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti koordinasi yang efektif baik dengan perangkat daerah maupun dengan instansi terkait daerah dengan komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk perbaikan kinerja, pemahaman pimpinan organisasi akan pentingnya penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi untuk mendukung kinerja, pemeliharaan sistem informasi untuk efektivitas pencapaian tujuan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Namun demikian terdapat beberapa kendala seperti masih



adanya SDM yang belum optimal dalam melaksanakan tugas, kebijakan reboosing anggaran yang berdampak pada penyesuaian rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta adanya perubahan regulasi sehingga perlu serta kesiapan regulasi daerah dan kemampuan penyesuaian terhadap kebijakan pusat.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, total pagu awal Sekretariat Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp72.317.444.812,00 dan disionalisasi menjadi Rp66.825.570.730,00. Realisasi sebesar Rp57.863.573.846,00 atau 86,58%, sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja sebesar 13,42%.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KE DEPAN

Strategi yang perlu dilakukan Sekretariat Daerah dalam perencanaan berikutnya untuk mendukung pencapaian kinerja berdasarkan RPJMD Kota Sukakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan instansi terkait dan perangkat daerah untuk menjalankan kebijakan;
- b. Meningkatkan kolaborasi dengan instansi pemerintah dan swasta dalam berbagai sektor;
- c. Peningkatan adaptifitas terhadap kebijakan pemerintah pusat;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala akan kinerja perangkat daerah;
- e. Memperkuat kolaborasi internal untuk mewujudkan visi misi Kota Sukakarta Tahun 2025-2029;



Sekretariat Daerah telah menyusun Rencana Awal (Raiwal) 2027 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Rencana Awal Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2027

No	Prog/Keg/Subkeg	Aktivitas	Anggaran
1	LABOR PENCUKLIS URUSAN PEMERINTAH		Rp. 542.513.826
2	SEKRETARIAT DAERAH		Rp. 542.513.826
3	PROGRAM PEMERINTAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		58.740.158.778
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		208.500.000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		208.500.000
		Penyediaan Jasa Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panelis	10.000.000
		Penyediaan Makan Minum Raport Penyusunan Rencana Kerja	20.000.000
		Penyediaan transportasi dan akomodasi	39.500.000
		Penyediaan Jasa Konsultansi Review Rencana	50.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Berkas Realisasi Kinerja DPRD		20.000.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
		Penyusunan atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000
		Penyusunan Mekanis Minor Rapat Penyusunan Laporan Kinerja	15.000.000
7	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		37.800.000
		Penyusunan RKA-SKPD	14.800.000
		Penyusunan DPA SKPD	23.000.000
	4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		38.400.000
		Penyusunan atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000
		Penyusunan Mekanis Minor Rapat Penyusunan Laporan Kinerja	12.700.000
	4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.000.000
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		20.896.429.775
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		20.896.429.775
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS dan PPK Sekretariat	29.028.339.775,00



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
		Daerah	
		Honorarium Pegawai Keuangan	676.000.000,00
		Honorarium PBJ	102.000.000,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran BKPD		58.100.000
		Penyediaan Jasa Nersumber atau Pembelian, Makanan, Pembawa Air, dan Pakaian	2.700.000
		Penyediaan Makan Minum Rasio Penyusunan Laporan Keuangan	12.400.000
		Penyediaan transportasi dan akomodasi kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Sekelompok Daerah (mengumpulkan 8 Bendahara dan Bendahara Pembantu)	35.000.000
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		451.500.000
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		200.000.000
		Pengadaan Seragam Bagian Umum	200.000.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		182.800.000
		Penyediaan Jasa Konsultansi ISO	50.000.000
		Penyediaan Jasa Konsultansi SOP	50.000.000
		Penyediaan Jasa Konsultan atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000
		Penyediaan Penghargaan atas Suku Prestasi	8.500.000
		Penyediaan Uang Transportasi Pegawai	2.300.000
		Penyediaan Makan Minum Rapat Monev Kepegawaian	48.500.000
14	Administrasi Umum Peringkat Daerah		3.129.400.000
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100.100.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	100.100.000
16	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor		180.600.000
		Pengadaan Alat Tulis Kantor	118.500.000
		Penyediaan Kertas untuk Kebutuhan Kantor	76.700.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		292.300.000
		Belanja Bendera, Umbul-Umbul dan Pagar	11.300.000
		Cetak MMT	10.700.000
		Pengadaan Kalender	21.400.000
		Penyediaan Barang Cetak Kantor	128.800.000
		Penyediaan Jasa Jrit dan Penggandaan	10.000.000
		Sewa Mesin Fotokopi	44.000.000
18	Penyetenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi BOPD		2.594.400.000
		Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar Negeri	200.000.000
		Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000.000
		Penyediaan Makan Minum Rapat	344.400.000
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.400.000.000
20	Pengadaan Mebel		300.000.000
		Pengadaan Mebel	300.000.000
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.100.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	1.100.000.000
22	Penyediaan Jasa Penunjang		10.504.500.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
	Utusan Pemerintahan Daerah		
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		44.500.000
		Penyediaan Materai, Benda Pos dan Jasa Pengiriman Jasa Paket	44.500.000
24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		3.900.400.000
		Belanja Kawat/Faksel/Internet/TV Berlangganan	44.500.000
		Pembayaran PBB	44.000.000
		Penyediaan Jasa Langganan Jurnai/Surat Kabar/Majalah	67.100.000
		Penyediaan langganan Satelit	3.800.000.000
		Penyediaan langganan PDAM	98.800.000
		Penyediaan langganan telepon	88.000.000
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		300.000.000
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	300.000.000
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		6.208.900.000
		OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1.017.500.000
		Powal Pembangunan HLT III	22.000.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
		Pembayaran Jasa Pelayanan Utama Kantor	52.800.000
		PENATA LAYANAN OPERASIONAL	300.500.000
		PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	121.100.000
		PENGELOLA UMSJ OPERASIONAL	3.100.000.000
		Pengisian Uang Penghantar Ruang	48.200.000
		Penyediaan Bahan Bakar Gas	3.100.000
		Penyediaan Bahan dan Aul Kebutuhan	200.000.000
		Penyediaan Jasa Laundry	11.000.000
		Penyediaan Jasa Tenaga Ketersihan	900.500.000
		Penyediaan Jasa Tenaga Pengeruk	272.800.000
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan kantor	11.000.000
		Penyediaan Uang Lembur (luar jam kerja)	48.300.000
		Rembuh Sempati	27.500.000
		Sewa Peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan	12.000.000
		Sewa Tanaman	70.200.000
27	Perbaikan Barang MAJ Daerah Penyemping Urusan Pemerintahan Daerah		7.514.000.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.477.600.000
		Awaransi	8.200.000
		Pemeliharaan Motor Dinas	340.000.000
		pemeliharaan motor dinas	153.100.000
		Penyediaan Bahan Bakar Minyak	808.200.000
		Penyediaan Jasa RPR dan Pajak Kendaraan	79.000.000
29	Pemeliharaan Mebel		66.700.000
		Pemeliharaan Mebel	66.700.000
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		6.216.400.000
		Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas Wakil Walikota	190.000.000
		Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas Walikota	200.000.000
		Pemeliharaan Taman Balikpapan	70.000.000
		Pemeliharaan Taman Rumah Jabatan	60.000.000
		Rehabilitasi Gedung Tawang Progs	3.206.000.000
		Pemeliharaan Rumpun Rasat Mangrove Pura	1.180.000.000



No	Prog/Kag/Subkag	Aktivitas	Anggaran
		Penyediaan Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor insidental	110.000.000
		Penyediaan Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Rumah Jabatan insidental	88.000.000
		Penyediaan Ongkos Tukang untuk Pemeliharaan Gedung Kantor	113.000.000
		Penyediaan Ongkos Tukang untuk Pemeliharaan Rumah Jabatan	67.300.000
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		794.100.000
		Pemeliharaan Lift Kompleks Balakota	138.500.000
		Pemeliharaan Lift Kompleks Balakota (2 unit Lift di gedung wing pra)	300.000.000
		Perbaikan Service, Penggantian Suku Cadang dan Pengisian Freon AC rumah	67.500.000
		Perbaikan Service, Penggantian Suku Cadang dan Pengisian Freon AC apart	118.100.000



No	Prog/Keg/Subkeg	Aktivitas	Anggaran
		Service dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Mesin, Hewan, Lift, Genet, Sound System dan Perabot Lainnya	110.000.000
32	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.027.508.000
33	Penyetoran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		928.150.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	853.150.000
		Penyediaan Asuransi Kesehatan KDH dan WKDH	75.000.000
34	Penyetoran Pakwan Dinas dan Abilut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		98.358.000
		Penyetoran Pakwan Dinas KDH dan WKDH	98.358.000
35	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		45.000.000
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45.000.000
36	Fasilitas Karamahatunggal Sekretariat Daerah		1.075.000.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		515.000.000
		Belanja Doorprize Kegiatan KDH	100.000.000
		Penyediaan Makan dan Minum Harian KDH	240.000.000
		Jasa Laundry KDH	90.000.000
		Facilitas Kegiatan Kemaspraktakan KDH	100.000.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	35.000.000
		Penghargaan Apresiasi Untuk Tokoh Inspiratif	50.000.000
38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		480.000.000.00
		Belanja Doorprize Kegiatan WKDH	100.000.000
		Penyediaan Makan dan Minum Harian WKDH	180.000.000
		Jasa Laundry WKDH	80.000.000
		Facilitas Kegiatan Kemaspraktakan WKDH	100.000.000
39	Perutusan Organisasi		1.400.000.000
40	Pengelolaan Kelembagaan dan Aparatur Jabatan		300.000.000
		Evaluasi Kelembagaan	70.000.000
		Pertemuan Dokumen Review Anjab, ASK, dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemkot Sorokota	100.000.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
		Penyusunan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	60.000.000
		Penyusunan Perkada Tambahan Penghasilan ASN	75.000.000
41	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		200.000.000
		Fasilitas Pendampingan Inovasi Perangkat Daerah	100.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Kerja	25.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Dinas	25.000.000
		Penyusunan Perwali Penyusunan Proses Bisnis dan SOP	50.000.000
42	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		100.000.000
		Fasilitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	100.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja	50.000.000
43	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		520.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	20.000.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	200.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis dan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	30.000.000
		Monitoring dan Evaluasi SKM dan PKF di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	200.000.000
44	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		225.000.000
		Penyusunan LKjP Kota Surabaya	75.000.000,00
		Penilaian Kinerja Organisasi	150.000.000,00
45	Pelebaran Protokol dan Komunikasi Program		3.674.818.000
46	Facilitasi Keprotokolan		1.622.308.000
		Layanan Keprotokolan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota / Advance Tim Protokol	155.000.000
		Facilitasi Rombongan Lapangan Walikota dan Wakil Walikota	24.378.000
		Penerimaan Tamu	371.520.000
		Polahen Keprotokolan	115.944.000
		Evaluasi Polahen Keprotokolan	28.428.000



No	Prog/Kag/Subkag	Aktivitas	Anggaran
		Upacara Peringatan Hari Besar	557.045.000
47	Facilitas Komunikasi Pimpinan		1.309.229.000
		Konferensi Pers	13.125.000
		Pembuatan Analisa Berita dan Pendaftaran Opini Publik	100.000.000
		Disang TV	100.000.000
		Komunikasi Pimpinan Media Radio	400.000.000
		Lomba Pembuatan Logo Hari Jadi Kota Solo	95.000.000
		Saran Event Special	90.000.000
		Saran Langsung Radio	12.500.000
		Saran Langsung Online	30.000.000
		Facilitas Kegiatan Komunikasi Kemasyarakatan	180.000.000
		Pembuatan Dokumentasi Video	60.000.000
		Man Layanan Masyarakat	150.000.000
		Media Gathering	175.000.000
		Publikasi Kebijakan Pimpinan Lewat Media Cetak dan Elektronik	150.000.000
		Refleksi Tahunan Pimpinan Daerah	150.000.000
48	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		747.285.000
		Cetak Foto Dokumentasi	3.700.000
		Pengadaan Plak	67.400.000
		Laporan Kegiatan Pimpinan	176.250.000



No	Prog/Kag/Subkag	Aktivitas	Anggaran
		Batas-batas Karanganyar	238.000.000
		Penyediaan Langanan Telepon	100.000.000
		Penyediaan Peralatan Perengkapan Kantor TU Pimpinan	98.000.000
		Peatihan Aplikasi Perguruan Pimpinan	61.900.000
49	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RUKYAT		4.334.011.000
50	Administrasi Tata Pemerintahan		1.441.218.833
51	Peraturan Administrasi Pemerintahan		117.330.000
		Penyusunan Dokumen LKPD Wakil Kota	117.330.000
52	Pengadaan Administrasi Kewilayahan		1.264.116.847
		Facilitas Koordinasi Penyenggaraan Trend Dan Kbd	37.100.000
		Facilitas Koordinasi Pemeliharaan Kawilayahan	208.717.250
		Facilitas Pembinaan Kecamatan	37.900.000
		Facilitas Pemekaran Kekurahan	92.500.000
		Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Dpk	44.163.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
		Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Lomba Kelurahan)	344.541.000
		Penamaan Unsur Rujukan	5.300.000
		Pemngesan Batas Wilayah	30.300.000
		Sosialisasi Desa Pembangunan Kelurahan (Dpk)	3.750.000
		Facilitas Konsultasi Sipta Otonomi Daerah	251.719.488
		Penyusunan Dokumen Dan Penyangan Rppd	10.300.000
		Penyusunan Dokumen Laporan Penerimaan Spt	10.600.000
		Penyusunan Dokumen Lppd	33.180.500
		Desk Pemetaan Potensi Rencana Kerja Sama Dalam Negeri	3.710.000
		Facilitas Riset Bahan Penyusunan Kerja Sama	10.504.000
		Rekulturbatuh Pemerintah Kop Surakarta Dalam Keuanganan Forwastasi, Apeksi Komwil II, Dan Apoka	75.000.000
53	Facilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		535.554.888



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
		Konsultasi Dan Rapat Koordinasi Luar Daerah Dalam Rangka Fasilitas Kerja Sama Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	110.100.000
		Pengembangan Rapat Kerja Teled	10.910.000
		Penyelenggaraan Workshop Pemetaan Pola dan Rencana Kerja Sama Dalam Negeri	34.155.000
		Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Dalam Negeri	129.120.000
		Fasilitas Rapat Koordinasi Hubungan Luar Negeri	3.040.000
		Jamuan Penerimaan Tamu Di Restoran	13.400.000
		Kekubertan Pemerintah Kota Bukarata Dalam Ujung Anpor Dan Owtic-Ap	102.020.000
		Pengobatan Susutur Dan Cendekmata	10.210.000
		Pengobatan Diatas Luar Negeri	80.000.000
		Pengobatan Diatas Pengurusan Hubungan Internasional	25.000.000
54	Pembinaan Kebijakan Pengawasan Rakyat		4.323.411.000
55	Fasilitas Pengeluaran Biro		2.576.741.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
	Mental Spiritual		
		Pelayanan Jemaah Haji	306.296.000
		Pembayaran Pengusut Haji Dwarka	500.000.000
		Perayaan Natal Pemerintah Kota Sukoharjo	100.000.000
		Peremuan Tokoh Agama/ Alim Kepercayaan dengan Pemerintah	22.167.000
		Facilitas Idul Adha dan ribuan hewan kurban	300.427.000
		Facilitas Pengajian Rutin Pekot	24.842.000
		Operasional Masjid Salakota	47.800.000
		Facilitas Sholat Hari Raya Idul Fitri	4.670.000
		Rekreasi Agama Kristen	8.317.000
		Rekreasi Agama Katolik	8.317.000
		Pembinaan Kerohanian ADN Pemko Sukoharjo	47.434.000
		Semua Khotaman Al Quran	26.842.000
		Safat Sholat Jumat	12.500.000
		Pengajian Akbar, Dakir dan Sholat	300.000.000
		Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW	75.000.000
		Facilitas LPTG dan MFG Kota Sukoharjo	100.000.000
		Haji di luar ASN	100.000.000



No	Prog/Keg/Subkeg	Aktivitas	Anggaran
		Pelatihan Keagamaan	10.375.000
		Fasilitas Paspasawi	8.375.000
		Fasilitas Paspasari	8.375.000
		Fasilitas Peningkatan Ruang Keagamaan	750.000.000
58	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		1.585.795.000
		Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Hibah kepada Badan/Lembaga Organisasi	1.100.000.000
		Koordinasi Tim Pemping UKDM Kota Sukarta	14.500.000
		Pembinaan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	22.500.000
		Monitoring dan evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	9.500.000
		Kepsekretaratan Tim Pembina Pelayudu Kota Sukarta	67.715.000
		Peningkatan Kapasitas Pelayudu Plus Berbasis Standar Pelayanan Minimal bagi Pengurus dan Kader	80.400.000
		Peningkatan Kapasitas Pelayudu Plus Berbasis Standar Pelayanan Minimal bagi Tim Pembina	37.500.000



No	Prog/Kag/Subkag	Aktivitas	Anggaran
		Polyandu	
		Koordinasi Tim Penderita Polyandu Kota Surakarta	15.000.000
		Monex Aduan Polyandu Plus Berbasis Standar Pelayanan Minimal	28.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Polyandu Plus Berbasis Standar Pelayanan Minimal (Penghargaan Polyandu Berprestasi)	58.000.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Penanggulangan Tuberculosis Kota Surakarta	30.500.000
		Koordinasi BATSAS Program MRG	22.000.000
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MRG	21.250.000
		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	32.500.000
57	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		60.875.000
		Monitoring dan Evaluasi Pengalokasian SIPKEMAS	15.025.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
		Koordinasi Forum Kasra	1.750.000
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	16.500.000
		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Rumah Sesi Kerja	7.500.000
		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Keajaiban Masyarakat	17.500.000
58	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.211.000.000
59	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		225.000.000
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	115.000.000
		Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	40.000.000
		Makan Minum Rapat	30.000.000
		Perjalanan Dinas	40.000.000
60	Fasilitasi Bantuan Hukum		725.000.000
		Pendampingan Penyelidikan Pemmasalahan Hukum	160.000.000
		Bersama / Penanganan Pemmasalahan Hukum	340.000.000
		Bantuan Hukum Warga Mekan	40.000.000
		Review Kontrak	100.000.000
		Workshop Bantuan Hukum	75.000.000
		Makan Minum Rapat	30.000.000
		Perjalanan Dinas	40.000.000



No	Prog/Kag/Subbag	Aktivitas	Anggaran
61	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		532.000.000
		Penyusunan Kajian Penelitian Daerah	52.000.000
		Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah	32.000.000
		Statistika Peraturan Daerah	68.000.000
		Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	180.000.000
		Penyelenggaraan Keluarga Sedar Hukum (Kudakum)	98.000.000
		Makan Minum Rapat	25.000.000
		Perjalanan Dinas	25.000.000
62	fasilitas kerjasama Daerah		10.500.000
63	fasilitas kerja sama Dalam Regeri		10.500.000
		Desk Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	5.300.000
		Rapat Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	5.300.000
64	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMANJANGAN		3.268.546.050
65	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		400.313.000
66	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penguasaan		347.500.000



No	Prog/Kag/Subkag	Aktivitas	Anggaran
	BUMD dan BLUD		
		Penyusunan Ragan BUMD/BLUD	300.000.000
		Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan BUMD	40.000.000
		Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan BLUD	7.500.000
67	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		35.200.000
		Fasilitas dan Monitoring TPID	35.200.000
68	Perencanaan dan Pelaksanaan Ekonomi Masyarakat		127.600.000
		Fasilitas dan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan UMKM	35.200.000
		Fasilitas dan Koordinasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)	10.000.000
		Fasilitas dan Koordinasi CSR/TJSP	10.300.000
69	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)		17.613.000
		Fasilitas dan Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	17.613.000
70	Administrasi Pembangunan		1.004.000.000
71	Fasilitas Penyusunan Program		45.000.000



No	Prog/Keg/Subkeg	Aktivitas	Anggaran
	Pembangunan		
		Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Sulawesi	45.000.000
72	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		834.000.000
		Monevring dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur	95.000.000
		Monevring dan Pengendalian Capaian Rencana Program Pembangunan Seluruh SKPD di Pemerintah Kota Sulawesi	70.000.000
		Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dana Transfer	8.000.000
		Monevring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian Atas-Risiko	40.000.000
		Pengendalian Percepatan Pembangunan Daerah	120.000.000
		Pendampingan Pembangunan Proyek Strategis	500.000.000
73	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		125.000.000
		Rapor Kinerja Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	60.000.000



No	Prog/Keg/Subkeg	Aktivitas	Anggaran
		Pelatihan Mandiri DPPP Terintegrasi	25.000.000
74	Pengadaan Barang dan Jasa		725.000.000
75	Pengadaan/Pengadaan Barang dan Jasa		335.000.000
		Fasilitas Ruang Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000
		Simak Peningkatan Kapasitas PPK	35.000.000
		Pemeliharaan dan Pemisahan Amp	60.000.000
76	Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		60.000.000
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Perukung Pengadaan Barang dan Jasa	60.000.000
77	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		310.000.000
		Peningkatan Penggunaan Katalog Elektronik	105.000.000
		Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	35.000.000
		Razor Money Pengadaan Barang dan Jasa	40.000.000
		Regulasi Operasional Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa	35.000.000
		Pelatihan SIKAP	30.000.000



No	Prog/Kag/Subkag	Aktivitas	Anggaran
		Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	75.000.000
T8	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Air		138.033.000
80	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		101.783.000



No	Prog/Kag/Subkag	Aktivitas	Anggaran
		Sekretariat DPMCHT	101.783.000
81	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		37.280.000
		Fasilitas dan Koordinasi BRM dan LPG Bersubsidi	30.250.000
		Fasilitas dan Koordinasi Hemat Energi dan Air	7.030.000
	TOTAL		367.542.712.625

Surakarta, 10 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA



RIKO MURTIANDI, S.E., M.D.
Jenderal Utama Muda
NIP. 93110101928211010



LAMPIRAN

1. PK Perubahan Tahun 2025



**PEMERINTAH KOTA SUKABANDA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 275a (D111) SUKABANDA, WILAYAH SUKABANDAKOTA
P. Kode : 34131
SUKABANDA
47131

**PERJALAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Demi rangka mewujudkan kemajuan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda dengan di bawah ini:

Nama : Rudi Widiyanto, S.E., M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Sukabanda

selanjutnya disebut **PIWAK KEDUA**:

Nama : Ruzqiyah Anwarul Ulfah
Jabatan : Wai Kota Sukabanda

selaku Wakil Gubernur **PIWAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PIWAK KEDUA**,

PIWAK KEDUA selanjutnya akan melaksanakan tugas kinerja yang ditentukan sesuai lampiran perjanjian PK, dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIWAK KEDUA akan melakukan evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian PK dan melaporkan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabanda, 14 September 2025

PIWAK KEDUA
Wai Kota Sukabanda,

PIWAK KESATU
Sekretaris Daerah Kota Sukabanda,



REKAM JEJAK DAN LAMPIRAN
TAHUN 2023

No	Isu atau Strategi/TPD	Indikator Kinerja	Target Kinerja Perencanaan	Target Kinerja Pencapaian
1	Terselenggaranya kegiatan yang mendukung kegiatan pusat dan wilayah kerja	1. Jumlah Kegiatan/Program Peningkatan Mutu	100 %/100	100 %/100
		2. Persentase ketercapaian kegiatan/kegiatan yang diperencanakan	100 %	100 %
2	Peningkatan Kualitas dan Kinerja Karya dan Peningkatan Layanan	1. Jumlah KPI	1.000	1.000
		2. Nilai KPI	3,8 Mdn	3,8 Mdn
3	Peningkatan Efektivitas Kinerja	1. Nilai KPI	30 Mdn	30 Mdn
		2. Persentase Tercapainya target kinerja secara yang diperencanakan untuk kegiatan	100 %	100 %

No	Program	Progres Realisasi Pencapaian (%)	Progres Realisasi Pencapaian (%)	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN PENGARUFAN	1.000.000.000	1.000.000.000	100% Pencapaian
2	PROGRAM PENERANGAN KELEKTRIFIKASIAN	1.000.000.000	1.000.000.000	100% Pencapaian
3	PROGRAM PENYALURAN SALURAN AIR	1.000.000.000	1.000.000.000	100% Pencapaian

Sumbawa, 11 September 2023





2. Capaian Kinerja eSAKIP TW I s.d. TW IV



PEMERINTAH KOTA SURABAYA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdul Wahab No. 2, Tegal, 60118/60222, Madya, Kota Surabaya, Jawa Timur
e-mail: esekretaris@surabaya.go.id
telp: 031-82944476
03111

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB VALIDITAS DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 TERLAMPAI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI KRISTONO, S.E., M.Si
Fungsional/Kelompok : Penerima Utama Madya
NIP : 197110101980210101
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap validitas data Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta data pendukungnya yang diarsipkan melalui Aplikasi eSAKIP sebagai dasar Data Pemasaran Terpadu Penghadiran Pegawai berdasarkan Perencanaan Produktivitas Kerja pada unsur Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Demiikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 April 2023


DEWI KRISTONO, S.E., M.Si
Penerima Utama Madya
NIP. 197110101980210101



2019/2020 BUDGET
ADMINISTRATIVE SUPPORT COSTS (ASCS)
2019/2020

No.	Project & Activity Description	Location	2019/2020				2019/2020				Total	Remarks
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
1	Administrative Support Costs (ASCS)	Nairobi	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Administrative Support Costs (ASCS)	Nairobi	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
2	Administrative Support Costs (ASCS)	Nairobi	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020

3	Administrative Support Costs (ASCS)	Nairobi	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
4	Administrative Support Costs (ASCS)	Nairobi	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
5	Administrative Support Costs (ASCS)	Nairobi	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020

6	Administrative Support Costs (ASCS)	Nairobi	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
---	-------------------------------------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Airlangga Selatan No. 1, Telp: (031) 842222, Faksimil: (031) 842222-10
e-mail: sekretariat@psd.surabaya.go.id
02120407190701000
61111

**BUKIT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB VALIDITAS DATA
CAPAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024 TRIMULAK II**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yulu Pringgil, S.E., M.Si.
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda
MP : 19720407190701000
Jabatan : PA, Sekretaris Daerah

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab mutlak terhadap validitas data Capaian Kinerja Utama Utama Perangkat Daerah beserta data pendukung yang disampaikan melalui Aplikasi eKAMIP sebagai data dasar Perencanaan, Tambahan, Pengawasan, Pelaporan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja pada masa Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juli 2024

PA, Sekretaris Daerah
Kota Surabaya

Yulu Pringgil, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
MP: 19720407190701000



**PERMINTAAN
KONTRAK/PERAKSIAN/PERALANAN
TAHAP DAN TINGKATAN**

No	Nama Barang/Jasa	Kategori	Kuantitas				Tipe/Spesifikasi				Estimasi Harga	
			Unit	Estimasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50


 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten ...



**PEMERINTAH KOTA SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sentra Sukoharjo No. 2, Telpom (0271) 40202, Jl. Raya, Sukoharjo, Sukoharjo
E-mail: sekretariat@kota.sukoharjo.go.id
SUKOHARJO
51111

**SKRIPSI PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB VALENTAS DATA
CAPSIAN MERKA FOR SINGKLA UTARA PERANGKAT DAERAH
TAKUN 2023 TERKULAN II**

Nama yang berkecimpung dengan di bawah ini:

Nama : Nuli Martono, S.E., M.Si

Pengangkatan : Pemilihan Utara Mula

NIP : 027110101880024103

Jabatan : Sekretaris Daerah

Sejarah ini merupakan tanggung jawab penuh untuk seluruh Unit/Unit Kerja Capaian
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai data dan informasi yang disampaikan
melalui Aplikasi eLMDP sebagai dasar Pembinaan Tambahan Peningkatan Pegawai
Kandungan Persepsi Produktifitas Kerja pada unit Capaian Kinerja Perangkat
Daerah.

Sejarah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sukoharjo, 9 Oktober 2023

Sekretaris Daerah
Nuli Martono



Nuli Martono, S.E., M.Si
Pemilihan Utara Mula
NIP. 027110101880024103



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Abdul Samad No. 1, Telp. (031) 82221, Website: www.surabaya.go.id,
E-mail: asdas@surabaya.go.id
60275
0311

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB VALEDITAS DIRTA
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PESENGKAT DAERAH
TAHUN 2020 TRIMULAN IV**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sut Murtomo, S.E., M.Si
Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya
NIP : 197110101980021019
Jabatan : Sekretaris Daerah

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap Validitas dan Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta data dukungnya yang diumumkan melalui Aplikasi eSAMP sebagai dasar Pembinaan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja pada unsur Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Januari 2020


Sekretaris Daerah
Kota Surabaya
Sut Murtomo, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197110101980021019



**REKAM RANGKAIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TANGGAL 2019-01-01**

No	Jenis	Nama	Kategori	Kode	Jumlah			Nilai			Rendemen			
					Unit	Nilai	Nilai	Unit	Nilai	Nilai	Unit	Nilai	Nilai	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



